LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN PDRB LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG BARAT

GRASICA

PT. Anugrah Solusi Carvidae

Koppelmanggo

LAPORAN AKHIR

PELAKSANAAN PENYUSUNAN PDRB LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG BARAT

bappeltbangda

PT. Anugrah Solusi Carvidae

PT. ANGURAH SOLUSI CARVIDAE

2021

Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 atas Kerjasama Bappedalitbang Kabuapten Bandung Barat dengan PT Anugrah Solusi Carvidae, dapat terselesaikan. Secara garis besar laporan Pendahuluan ini masih belum sempurna, oleh karenanya perlunya masukan dan perbaikan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna tercapainya tujuan dari kegiatan Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi.

Bogor, November 2021
Direktur

Effie Kunaefi, ST

bappelitbangda

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi Ii
Daftar Tabel Iii
Daftar Gambar Iv

BAB 1. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran 2
1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan 3
1.4 Keluaran 4
1.5 Sistematika Penulisan 4

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 5
2.1 Pengertian PDRB Hijau 5
2.2 Deplesi Sumberdaya Alam 6
2.3 Dimensi Ekonomi 6
2.4 Urgensi PDRB Hijau 7
2.5 Dasar Hukum PDRB Hijau 7
2.6 Kajian Terdahulu 9

BAB 3. METODOLOGI 13
3.1 Waktu dan Tempat 13
3.2 Jenis dan Sumber Data 13
3.3 Metode Analisis 13
3.4 Tahap Pelaksanan 24

BAB 4. KEADAAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT 26
4.1 Kondisi Geografis Daerah 26
4.2 Kondisi Ilkim 28
4.3 Kondisi Topogarfi 28
4.4 Pemanfaatan Lahan 28
4.5 Sumberdaya Air dan Lahan 29
4.6 Kondisi Ekonomi 33

BAB 5. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KEBUPATEN BANDUNG BARAT 38
5.1 Kinerja Perekonomian Perubahan PDRB Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Periode 2018 dan 2020 38
4.2 Kondisi Ilkim 28
4.3 Kondisi Topogarfi 28
4.4 Pemanfaatan Lahan 28
4.5 Sumberdaya Air dan Lahan 29
4.6 Kondisi Ekonomi 33

bappelitbangda

DAFTAR PUSTAKA 38

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020	26
Tabel 4.2	Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat (dalam Ha)	29
Tabel 4.3	Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020	31
Tabel 4.4	APM dan APK Menurut Jenis Kelamin,dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017	32
Tabel 4.5	Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2017	32
Tabel 4.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020 (dalam Rp Juta)	35
Tabel 5.1	Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku, Tahun 2018 dan 2020 (dalam Rp Miliar)	38
Tabel 5.2	Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2018 – 2020	39
Tabel 5.3	Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010, Tahun 2018 dan 2020 (dalam Rp Miliar)	40
Tabel 5.4	Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2018 – 2020 (ADHK)	41
Tabel 5.5	Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku, Tahun 2018 dan 2020 (dalam Rp Miliar)	42
Tabel 5.6	Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018 – 2020	43
Tabel 5.7	Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010, Tahun 2018-2020 (dalam Rp Milyar)	44
Tabel 5.8	Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018 – 2020 Berdasarkan atas Harga Konstan 2010	45
Tabel 5.9	Rasio PDRB Kabupaten Bandung Barat dan PDRB Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020 (Nilai Ra, Ri dan ri)	46
Tabel 5.10	Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Regional (PR), Tahun 2018-2020	47
Tabel 5.11	Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), Periode 2018-2020	48
Tabel 5.12	Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW), Periode 2018-2020	49
Tabel 5.13	Pergeseran Bersih Kabupaten Bandung Barat Periode 2018-2020	52
Tabel 5.14	Nilai LQ Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020	52

Tabel 6.1	Nilai Deplesi Pemanfaatan Air di Perkantoran Pemerintahan	54
Tabel 6.2	Deplesi Air Pemanfaatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	54
Tabel 6.3	Acuan Penggunaan Air pada Pemanfaatan Sosial di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 – 2015	55
Tabel 6.4	Deplesi Air Pemanfaatan Sosial di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020	55
Tabel 6.5	Perkembangan Jumlah Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020	56
Tabel 6.6	Deplesi Air Pemanfaatan Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	56
Tabel 6.7	Deplesi Rumput Pemanfaatan Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	57
Tabel 6.8	Perkembangan Jumlah Unggas di Kabupaten Bandung BaratTahun 2020.....	57
Tabel 6.9	Deplesi Air Pemanfaatan Ternak Unggas di Bandung Barat Tahun 2020	57
Tabel 6.10	Deplesi Air Pemanfaatan Sosial di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020	55
Tabel 6.11	Data Jumlah Industri di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	58
Tabel 6.12	Nilai Deplesi Air Pemanfaatan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	58
Tabel 6.13	Nilai Deplesi Air Pemanfaatan Kios di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 - 2017.....	59
Tabel 6.14	Jumlah Unit Kamar, Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	59
Tabel 6.15	Nilai Deplesi Air Pemanfaatan Kantor Jasa Keuangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	60
Tabel 7.1	Jumlah Warga di Wilayah Terdampak.....	61
Tabel 7.2	Penderita ISPA di Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, Kabupateen Bandung Tahun 2020.....	61
Tabel 7.3	Kerugian akibat Penyakit ISPA 2020	61
Tabel 7.4	Nilai Kerugian Kebersihan Rumah Tanggadi Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	62
Tabel 7.5	Kerugian Air Bersih Rumah Tangga (RT)di Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	62
Tabel 7.7	Nilai Kerugian Akibat Bau Sampah di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	63
Tabel 8.1	Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Tahun 2020 (Rp. Milyar).....	64

Laporan Akhir

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen.....	14
Gambar 4.1	Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat	27
Gambar 4.2	PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020 (Rp Juta)	36
Gambar 4.3	Share Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.....	37
Gambar 5.1	Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Periode 2015-2017	50

bappelitbangda

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pembangunan yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. PDRB merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian suatu daerah/negara dalam periode waktu satu tahun. Saat ini, pengukuran PDRB sebagai indikator pembangunan mengalami perkembangan dari PDRB konvensional (coklat) ke penerapan PDRB Lingkungan Hidup. Hal ini sejalan dengan berkembangnya konsep *sustainable development* di Indonesia. Selama ini salah satu indikator bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya adalah dari sisi meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayahnya. Akan tetapi, nilai yang tercantum pada PDRB Konvensional yang sudah diestimasi di berbagai daerah tersebut pada dasarnya belum mencerminkan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya, karena hanya menghitung nilai tambah dari setiap kegiatan produksi dan belum menghitung aspek penyusutan modal alam dan kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan ekonomi. Sedangkan PDRB Lingkungan Hidup merupakan perhitungan PDRB yang memasukkan unsur deplesi sumberdaya alam dan degradasi lingkungan.

Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan produksi (*Production approach*), menjumlahkan seluruh nilai tambah dari setiap sektor; (2) Pendapatan (*Income approach*), menjumlahkan semua jenis pendapatan yang diperoleh oleh para pemilik faktor produksi; dan (3) Pengeluaran (*Expenditure approach*), menjumlahkan seluruh pengeluaran setiap kegiatan di masing-masing sektor. Namun, ketiga pendekatan di atas ternyata masih mengeksternalisasi beberapa faktor produksi dan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas produksi. Nilai PDRB yang dihasilkan seolah-olah mengambarkan tentang pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu daerah baik secara total maupun secara sektoral, sehingga dianggap mencerminkan kesejahteraan daerah yang bersangkutan. Namun sesungguhnya tidak demikian, karena nilai sumberdaya alam yang hilang karena dieksploitasi (deplesi sumberdaya alam) dan degradasi (kerusakan) lingkungan yang belum diperhitungkan sebagai nilai kehilangan yang harus dibayar. Sehingga, muncul konsep PDRB Lingkungan Hidup.

Konsep PDRB Lingkungan Hidup muncul di awal tahun 1990-an sebagai reaksi terhadap defisiensi PDRB konvensional, yang selanjutnya disebut sebagai PDRB Konvensional. Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup sudah menghitung deplesi sumber-sumber alam dan degradasi lingkungan yang terjadi sebagai biaya pengurang dari PDRB Konvensional. Sehingga, PDRB Lingkungan Hidup menjadi indikator yang lebih tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Selain itu, PDRB Lingkungan Hidup juga dapat dijadikan acuan dasar bagi perencanaan yang berkelanjutan dengan memperhatikan keberadaan faktor sumberdaya alam dan lingkungan di suatu wilayah (Wu 2010).

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) bahwa *Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a* meliputi *neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan penyusunan produk domestik*

bruto (PDB) dan produk domestik regional bruto (PDRB) yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup pada pasal 5 dimanantkan bahwa instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menginternalisasikan aspek lingkungan hidup ke dalam perencanan dan penyelenggaraan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu agar dapat melihat tingkat keberlanjutan pembangunan Kabupaten Bandung Barat diperlukannya perhitungan PDRB Lingkungan Hidup dari 16 kategori lapangan usaha yang berkontribusi kepada PDRB Kabupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat sebagai Daerah Otonomi memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi di sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan. Tahun 2017 dan 2019 kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku dari Rp 40.204,40 tahun 2017, menjadi Rp 47.180,08 di tahun 2019.

Dalam suatu pembangunan daerah, pemerintah memiliki peranan yang besar dan menentukan dalam upaya-upaya untuk mengelola perekonomian daerahnya. Pada umum nya pemerintah turut campur dalam perekonomian untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pembangunan di daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki daerah tersebut. Apabila pemerintah tidak melakukan upaya-upaya dalam menjaga ketersediaan sumber daya alam tersebut maka akan mengancam eksistensi dari sumber daya alam dan lingkungan sehingga akan membahayakan proses pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), yang pada akhirnya hasil pembangunan yang dirasakan hanya sementara. Dampaknya adalah membuat sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan akan terdegradasi.

Dalam rangka menunjang tersedianya sumber daya alam maka dibutuhkan perencanaan pembangunan yang berorientasi kepada pemeliharaan SDA dan lingkungan, maka dari itu dibutuhkan informasi yang relevan terkait hal tersebut. Salah satu informasi yang dibutukan adalah PDRB, tetapi PDRB yang selama ini dikenal dengan PDRB coklat yang hanya mengukur kegiatan ekonomi bukan kesejahteraan ekonomi. Untuk dapat melihat dampak dari kenaikan PDRB memberikan dampak yang positif terhadap kelangsungan ketersediaan sumber daya alam.

Untuk dapat melihat dampak tersebut maka dibutuhkan mengenai PDRB Lingkungan Hidup yang dapat menampilkan hasil kegiatan ekonomi dan nilai serta dampak negatifnya terhadap hilangnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat memahami struktur perekonomian dengan lebih realistis dan mengetahui sumbangan yang nyata sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.2.1. Maksud

Maksud dilaksanakannya pekerjaan Kajian Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup ini adalah memberikan gambaran kondisi perekonomian terkini Kabupaten Bandung Barat beserta dampaknya terhadap sumberdaya alam dan lingkungan.

1.2.2. Tujuan

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah antara lain:

1. Untuk menganalisis sektor-sektor dalam PDRB yang dapat memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan sumberdaya alam.
2. Menghitung PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat untuk 16 kategori berdasarkan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.
3. Menganalisis hasil perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.
4. Menyusun implikasi atau rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten Bandung Barat dari hasil analisis perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020.

1.2.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah, terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung Barat yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta tercapainya Penyusunan Dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau.

1.3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Kajian Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

a. Informasi kondisi kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat dengan menampilkan:
   - Review atas trend kondisi historis dan eksisting dari sektor dan sub sektor yang terdapat di dalam PDRB.
   - Potensi dan proyeksi ke depan dari sektor-sektor yang terdapat di dalam PDRB.
b. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dari PDRB Lingkungan Hidup.
c. Metode valuasi ekonomi yang digunakan dalam penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.
d. Penghitungan PDRB Lingkungan Hidup tahun 2020.
e. Analisis PDRB Lingkungan Hidup.
f. Manfaat PDRB Lingkungan Hidup.
g. Kesimpulan dan Saran, yang diantaranya memuat hasil Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.

Tahapan pekerjaan Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat meliputi:

a. Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan.
b. Konsolidasi dengan lembaga/dinas terkait penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.
c. Pengumpulan Data, baik data primer maupun sekunder.
d. Analisis dan pengolahan Data.
e. Pelaporan.
f. Penyusunan Dokumen Kajian Penyusunan PDRB Lingkungan Hidup.

bplhbandung

1.4. Keluaran

Keluaran dari Pekerjaan Penyusunan PDRB Hijau di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2021, adalah Dokumen Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 yang meliputi:

1. Nilai Kerusakan lingkungan berdasarkan sektor-sektor pertumbuhan di Kabupaten Bandung Barat.
2. Nilai Depresiasi sumberdaya alam di Kabupaten Bandung Barat.
3. Nilai Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau) Kabupaten Bandung Barat.
4. Rekomendasi kebijakan pembangunan berkelanjutan Kabupaten Bandung Barat berdasarkan PDRB Hijau.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pelaporan terdiri dari 2 tahapan yaitu laporan pendahuluan dan laporan akhir. **Laporan Pendahuluan** merupakan bagian laporan ini merupakan laporan yang terdiri dari Latarbelakang, Tujuan, Metodologi dan Gambaran Umum Kabupaten Bandung Barat. **Laporan Akhir** merupakan penyempurnaan dari laporan draft akhir berisikan data hasil survey lapangan, data hasil kuesioner serta literatur terkait yang memuat hasil Kajian Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat serta kumpulan data sekunder, data survey lapangan dan masukan/saran dari tim teknis yang dijadikan sebagai bahan untuk dianalisis secara lengkap. Laporan ini juga berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

bappelitbangda

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian PDRB Hijau

Produk Domestik Regional Bruto atau yang dikenal dengan singkatan PDRB merupakan nilai bersih atau nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian (di suatu daerah) pada waktu tertentu (biasanya dihitung dalam jangka waktu satu tahun). Nilai tambah dalam perhitungan ini merupakan selisih antara seluruh nilai produksi dengan seluruh biaya input antara (intermediate input). Nilai tambah mencerminkan balas jasa atau pendapatan dari setiap pemilikfaktor produksi ke daerah. Perhitungan PDRB tahun 2015 yang terdapat pada buku Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2016 telah berubah, dari 17 sektor ekonomi menjadi 17 sektor. Berikut adalah pengelompokan lapangan usaha tersebut:\

A	:	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
B	:	Pertambangan dan Penggalian
C	:	Industri Pengolahan
D	:	Pengadaan Listrik dan Gas
E	:	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
F	:	Konstruksi
G	:	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H	:	Transportasi dan Pergudangan
I	:	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
J	:	Informasi dan Komunikasi
K	:	Jasa Keuangan dan Asuransi
L	:	Real Estat
M,N	:	Jasa Perusahaan/Business Activities
O	:	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
P	:	Jasa Pendidikan
Q	:	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
R,S,T,U	:	Jasa lainnya

Perhitungan PDRB ini dapat bermanfaat bagi: (1) penentuan tingkat kesejahteraan ekonomi, (2) sumbangan sektor kegiatan ekonomi, (3) laju pertumbuhan ekonomi/sektor, dan (4) rencana pembangunan regional/sektoral. Akan tetapi, Saat ini, kebanyakannya di berbagai daerah di Indonesia, nilai PDRB yang dihitung masih terbatas pada nilai kontribusi produk yang dipasarkan di setiap sektor ekonomi, tanpa mempertimbangkan unsur sumberdaya alam dan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas ekonomi di setiap sektor. PDRB tanpa memasukkan unsur sumberdaya alam dan lingkungan dikenal juga dengan sebutan PDRB Konvensional atau PDRB Coklat. Nilai PDRB Coklat ini cenderung bias jangka pendek.

Produk Domestik Regional Bruto Hijau (PDRB Hijau) merupakan pengembangan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Konvensional/ Coklat yaitu dengan memasukkan

bappelitbangda

dimensi lingkungan, yaitu berupa depresiasi sumberdaya alam ke dalam PDRB konvensional. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Hijau dikenal juga sebagai PDRB ramah lingkungan.

Depresiasi sumberdaya alam sebenarnya terdiri dari dua bentuk yaitu deplesi sumberdaya alam dan *degradasi lingkungan*. Keduanya dapat diterjemahkan sebagai ***scarcity rent***yang timbul karena adanya pengambilan (deplesi) dan perusakan (degradasi) dari sumberdaya alam yang bersangkutan. Yang penting di sini ialah kita dapat merumuskan tingkat depresiasi sumberdaya alam itu sebagai jumlah rupiah yang harus diinvestasikan untuk mempertahankan agar jumlah aset alam itu tetap tidak berubah.

Apabila PDRB Coklat yang telah dihitung kemudian memasukkan perhitungan nilai deplesi sumberdaya alam, maka dikenal dengan PDRB Semi Hijau. Selanjutnya, PDRB yang memasukkan unsur degradasi sumberdaya alam dan lingkungan disebut sebagai PDRB Hijau. Dengan memperhitungkan PDRB Hijau, maka akan didapat gambaran nilai Produk Domestik Bruto yang tidak bias kepentingan ekonomi jangka pendek.

2.1. Deplesi Sumberdaya Alam

Untuk sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dikenal apa yang disebut *Hotelling rent* yaitu sama dengan harga pasar sumberdaya yang bersangkutan dikurangi dengan biaya marginal pengambilannya. Total rent dapat diperoleh dengan mengalikan unit rent dengan volume sumberdaya alam yang diambil. Metode ini dapat digunakan pula untuk sumberdaya alam yang dapat diperbarui. Memang dalam praktek hasil penilaian tidak akan tepat, khususnya karena biaya marginal itu sulit didapat dan digantikan dengan biaya rata-rata sebagai pendekatan (*proxy*).

2.2. Degradasi Lingkungan

Degradasi lingkungan berarti menurunnya kualitas lingkungan seperti dalam hal tercemarnya udara dan air. Ukuran yang benar dari depresiasi ini adalah menurunnya nilai sekarang (*present value*) dari aliran jasa yang dapat diberikan oleh lingkungan. Hal ini dapat diperkirakan dari nilai marginal yang diterima konsumen yang mendapat tambahan satu unit pencemaran. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mengukur nilai barang yang tidak ada dipasar. Caranya ialah dengan menggunakan teknik penilaian langsung dengan menanyakan kesediaannya untuk membayar (*willingness to pay*) atau kesediaannya untuk menerima ganti rugi (*willingness to accept*). Hal ini dilakukan WWF dalam kajian HCVF di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi tahun 2009-2010.

Pendekatan lain untuk menilai degradasi lingkungan telah diusulkan oleh *The United Nation Statistic Division (UNSD)* dengan cara memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan kondisi lingkungan menjadi berkualitas seperti semula pada saat periode perhitungan itu dibuat (*replacement cost method*). Demikian pula biaya perlindungan untuk lingkungan (*defensive expenditures*) merupakan jumlah pengeluaran yang sebenarnya untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan kualitas lingkungan sehingga dapat dipakai untuk menilai bila terjadi kerusakan lingkungan.

bappelitbangda

2.3. Urgensi PDRB Hijau

Seperti yang telah diketahui, bahwasannya pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan berpotensi mengalami hambatan karena menipisnya sumberdaya alam akibat eksploitasi secara terus-menerus guna memaksimalkan kebutuhan masyarakat. Untuk menghindari dampak pembangunan yang semakin parah terhadap sumberdaya alam dan lingkungan, perlu dianut suatu paradigma baru yaitu bahwa pembangunan harus berwawasan lingkungan, yang dikenal juga dengan sebutan *sustainable development*.

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Karena paradigma pembangunan akan berubah ke arah pembangunan yang berkelanjutan, maka indikator pembangunan juga semestinya diubah, tidak lagi menggunakan PDB yang dihitung atas dasar *System of National Accoun*t (SNA), tetapi didasarkan pada PDB Hijau (*Green Gross Domestic Product* atau *Green* GDP) yang dihitung atas dasar konsep Sistem Penghitungan Terpadu antara lingkungan dan ekonomi (*System of Integrated Environmental and Economic Account*). Urgensi penerapan PDRB Hijau di Kota ataupun Kabupaten di Indonesia sejalan dengan Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang menetapkan penyusunan PDB Hijau sebagai kegiatan dalam program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar, 2007)

2.4. Dasar Hukum PDRB Hijau

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, disebutkan bahwa LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan paling lambat 3 (bulan) setelah Tahun Anggaran Berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk dibahas secara internal oleh DPRD. Diharapkan hasil pembahasan dimaksud dapat ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Barat dan disampaikan kepada Bupati Bandung Barat sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Barat Akhir Tahun Anggaran 2014 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentangProduk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 1) Seri A;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 Nomor 10 Seri A).

bappelitbangda

2.5. Kajian Terdahulu

a. Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat melakukan penyusunan PDRB Hijau untuk tahun 2010-2012. Perhitungan PDRB Hijau dilakukan hanya dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS, Bappeda, dan BPLHD Provinsi Jawa Barat. Nilai deplesi sumberdaya alam dihitung dari (i) deplesi sumberdaya air pada sektor pertanian padi dan sub sektor peternakan; (ii) deplesi kayu hutan dan kayu bakar dari sub sektor kehutanan; (iii) deplesi sumberdaya ikan; dan (iv) deplesi sumberdaya emas, pasir, dan batu kapur pada sektor pertambangan. Sementara itu, nilai degradasi lingkungan dihitung dari (i) degradasi kualitas udara pada sektor transportasi; (ii) degradasi lingkungan oleh sektor pertanian padi dan sub-sektor peternakan berupa gas methana (CH4); dan (iii) degradasi lingkungan sub-sektor kehutanan akibat penebangan kayu hutan berupa hilangnya daya serap CO2 oleh hutan.

Beberapa poin kebijakan/rekomendasi penting dari penyusunan PDRB Hijau di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Pengeluaran-pengeluaran untuk mencegah dampak kerusakan lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan yang dilaksanakan di masing-masing sektor harus dikurangkan dari nilai tambah di sektor tersebut, dan bukan sebagai penciptaan nilai tambah.
b. Dampak degradasi lingkungan (sebagian) sudah tercermin pada penurunan produktivitas semua sumberdaya tidak boleh dikurangkan dari nilai PDRB, sehingga tidak terjadi double counting.
c. Instrumen regulasi juga diperlukan untuk mengatualisasikan (sebagian) nilai jasa lingkungan yang sepatutnya diperhitungkan sebagai "nilai tambah" bagi daerah-daerah yang memelihara sumberdaya alamnya dengan baik.

Dengan demikian, PDRB Hijau di Jawa Barat akan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan secara lebih berhati-hati dan komperhensif. Setidaknya, PDRB Hijau diharapkan dapat diterapkan sebagai neraca pembanding (dari PDRB Konvensional di dalam sistem pelaporan keuangan.

Kementerian Lingkungan Hidup selanjutnya menyusun perhitungan PDRB Hijau untuk Kabupaten Karawang. Nilai deplesi sumberdaya dihitung dari penggunaan sumberdaya air di semua sektor kegiatan ekonomi. Sementara itu, nilai degradasi lingkungan tidak diperhitungkan dalam penelitian ini, karena sulitnya menghitung kerusakan lingkungan pada sumberdaya lahan, sumberdaya air, maupun sumberdaya udara di Kabupaten Karawang.

Kabupaten Majalengka melakukan perhitungan PDRB Hijau untuk tahun 2010-2012. Perhitungan untuk deplesi pada penggunaan sumberdaya alam dilakukan pada (i) air tanah (air bersih) pada sektor pertanian, Industri pengolahan, perdagangan, hotel, restoran, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa lainnya; (ii) tanah liat pada sektor Industri pengolahan yaitu pengolahan batu bata dan genteng; (iii) pasir pada sektor pertambangan dan galian yaitu galian pasir; (iv) batu alam pada sektor pertambangan dan galian yaitu usaha batu alam; dan (v) batu kapur pada sektor pertambangan dan galian yaitu usaha batu kapur. Perhitungan untuk degradasi lingkungan di Kabupaten Majalengka meliputi (i) alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian; (ii) degradasi emisi gas CH4 sub sektor peternakan dan tanaman padi; (iii)

degradasi hutan sekunder/hutan rakyat; (iv) limbah cair industri pengolahan; dan (v) total emisi CO^2 pada sektor transportasi (motor, mobil, truk, dan bus).

Kabupaten Sukabumi melakukan perhitungan PDRB Hijau untuk tahun 2009-2011. Perhitungan untuk deplesi pada penggunaan sumberdaya alam dilakukan pada (i) deplesi kayu jati dan kayu rimba; (ii) deplesi sumberdaya ikan; (iii) deplesi pasir beton; (iv) deplesi sumberdaya batu kapur; dan (v) deplesi sumberdaya air. Perhitungan untuk degradasi lingkungan di Kabupaten Sukabumi terdiri atas (i) jasa lingkungan yang hilang pada sektor kehutanan meliputi air dan tanah, karbon, banjir, dan keanekaragaman hayati; (ii) emisi CH^4 pada sektor pertanian dan sektor peternakan; dan (iii) degradasi kualitas udara pada sektor transportasi.

Perhitungan PDRB Hijau di Kabupaten Ciamis merupakan perhitungan PDRB Hijau yang komprehensif, karena pada kajian ini seluruh sektor dianalisis. Kajian ini dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Ciamis dengan menggunakan data dari tahun 2011-2013. Analisis yang digunakan adalah penilaian deplesi dan degradasi sumberdaya alam digunakan untuk menganalisis terhadap PDRB Hijau. Analisis deplesi menggunakan dasar analisis yang diperhitungkan sebagai pengurangan katersediaan sumberdaya alam terhadap penggunaan air, jenis-jenis tambang, kayu dan rumput. Sedangkan analisis degradasi menggunakan pendekatan terhadap biaya tambahan (*surcharge cost*) dari suatu kegiatan, biaya pencegahan (*cost of prevention*), biaya pengantian (*replacement cost*) biaya penyembuhan penyakit (*cost of illness*) dan biaya perjalanan (*travel cost*)**.**

Berdasarkan hasil analisis, tingkat deplesi sumberdaya alam Kabupaten Ciamis tiap tahunnya terus meningkat. Degradasi terbesar terjadi pada sub sektor kehutanan akibat alih fungsi lahan dan sektor indutri pengolahan akibat industri tahu dan industri tapioka dari sagu. Hasil perhitungan PDRB Hijau didapatkan bahwa PDRB Hijau masih dalam tataran surplus, dimana kondisi Kabupaten Ciamis masih dalam kondisi baik. Namun demikian permasalahan degradasi lingkungan yang telah menggangu kesejahteraan masyarakat seperti dampak dari industri tahu dan industri tapioka dari sagu perlu mendapatkan perhatian dan penanganan terkait limbah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil analisis, sektor industri pengolahan memiliki nilai perbedaan terbesar antara PDRB Coklat dengan PDRB Hijau jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya dari tahun 2011 hingga 2013, yaitu 32,48 persen di tahun 2011, 28,74 persen di tahun 2012 dan di tahun 2013 sebesar 25,93 persen. Sektor selanjutnya adalah untuk sektor pertanian, dengan rata-rata perbedaan antara nilai PDRB Coklat dan PDRB Hijau adalah 23 persen. Secara keseluruhan, nilai PDRB Hijau tahun 2011 di Kabupaten Ciamis lebih rendah 10,28 persen dibandingkan dengan PDRB Coklat, selanjutnya pada tahun 2012, nilai PDRB Hijau lebih rendah 8,90 persen dibandingkan dengan PDRB Coklat. Pada tahun 2013, terjadi penurunan perbedaan nilai keduanya, yaitu menjadi 8,75 persen. Jika dilihat pertumbuhan nilai pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ciamis, PDRB Coklat dari tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 9,77 persen, sedangkan untuk PDRB Hijau mengalami peningkatan sebesar 11,45 persen. Pertumbuhan ekonomi konvensional dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah 11,64 persen sedangkan PDRB Hijau mengalami peningkatan sebesar 11,82 persen.

Kerpeltanesa

b. Provinsi Bali

Salah satu kajian mengenai perhitungan PDRB Hijau pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karang Asem, Provinsi Bali. Pemkab Karang Asem melakukan kajian perhitungan PDRB Hijau pada tahun 2007. Pusat Rencana dan Statistik Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Departemen Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Karang Asem melakukan ujicoba penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan terhadap PDRB. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang menetapkan penyusunan PDB Hijau sebagai kegiatan dalam ProgramPeningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH, khususnya untuk penghitungan kontribusi hijau sektor kehutanan terhadap PDRB. Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Hasil kajian menyatakan bahwa nilai deplesi sumberdaya hutan adalah sama dengan nilai pengambilan sumberdaya hutan atas dasar penggunaan, sedangkan nilai degradasi lingkungan adalah sama dengan menurunnya nilai jasa lingkungan atas dasar penggunaan tidak langsung seperti fungsi konservasi air dan tanah, fungsi penyerap karbon, fungsi pencegah banjir, dan fungsi keanekaragaman hayati, termasuk degradasi lingkungan yang dinilai atas dasar tanpa melalui penggunaan seperti nilai opsi (*option value*) dan nilai keberadaan (*existence value*) akibat pengambilan sumberdaya hutan.

Kontribusi hijau sektor kehutanan pada PDRB Kabupaten Karangasem dapat dilihat dari pemanfaatan hutan secara tidak langsung oleh masyarakat sekitarnya yang menciptakan kegiatan ekonomi setelah dikurangi dengan kebakaran dan pencurian atau tebangan. Nilai deplesi sumberdaya hutan di Kabupaten Karang Asem diperoleh dengan pendekatan kebakaran hutan dan pencurian kayu yaitu mengalikan unit rent dengan volume kayu yang dideplesi. Total deplesi hutan yang terjadi dari tahun 2004 hingga tahun 2006 adalah Rp 26,650 juta, Rp 15,80 juta dan Rp 108,00 juta. Nilai degradasi lingkungan dianalisis berdasarkan atas nilai kerusakan hutan akibat tebangan atau pencurian dan kebakaran di Kabupaten Karangasem berupa konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, pencegah banjir, transportasi air dan keanekaragaman hayati. Nilai degradasi tahun 2004 hingga tahun 2006 berturut-turut adalah Rp 13,03 juta, Rp 7,97 juta dan Rp49,15 juta.

c. Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perhitungan PDRB Hijau di Nusa Tenggara Barat sudah dilakukan oleh Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Kota Mataram baru melakukan perhitungan PDRB Semi Hijau, yang diperoleh dari deplesi hanya untuk sektor (i) perdagangan, hotel, dan restoran; dan (ii) pengangkutan dan komunikasi. Sementara itu, perhitungan untuk degradasi lingkungan belum dilakukan, sehingga belum ada PDRB Hijau untuk Kota Mataram. Kabupaten Lombok Barat sudah melakukan perhitungan PDRB Hijau untuk tahun 2010. Metode perhitungan deplesi sumberdaya alam dilakukan melalui (i) air bersih; (ii) kayu bulat; (iii) pembukaan lahan hutan; (iv) penambangan pasir; (v) sirtu; (vi) tanah urug; (vii) tanah liat; (viii) penambangan emas; (ix) ikan laut dan ikan sungai; dan (x) satwa liar. Sedangkan, metode untuk perhitungan degradasi lingkungan meliputi (i) degradasi lahan kritis; (ii) degradasi akibat banjir; (iii) degradasi polusi air akibat limbah merkuri; (iv) degradasi akibat kebakaran hutan; (v) degradasi akibat penambang pasir; (vi) degradasi akibat penebangan hutan; (vii) degradasi

akibat perkebunan sawit; (viii) degradasi akibat angin topan; (ix) degradasi akibat rumah wallet; (x) degradasi akibat abrasi air laut; dan (xi) degradasi akibat serangan hama.

Kabupaten Lombok Timur melakukan perhitungan PDRB Hijau untuk sektor tanaman bahan makanan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan galian, serta listrik, gas, dan air bersih. Deplesi sumberdaya alam dihitung melalui sumberdaya air, kayu, ikan, batu apung, dan air. Sedangkan degradasi lingkungan dihitung melalui lahan kritir bekas tambang dan fungsi hutan sebagai penahan air.

d. Provinsi Jambi

Provinsi Jambi telah melakukan perhitungan PDRB Hijau untuk tahun 2010. Metode perhitungan deplesi dilakukan terhadap sumberdaya alam (i) air bersih pada semua sektor; (ii) hasil hutan; (iii) tambang batubara; (iv) penambangan pasir; (v) tanah urug; (vi) tanah liat; dan (vii) ikan laut dan sungai. Sementara itu, metode perhitungan untuk degradasi lingkungan di Provinsi Jambi dilakukan terhadap (i) lahan kritis; (ii) polusi air di sungai batanghari; (iii) polusi udara karena kebakaran hutan; (iv) lubang-lubang penambangan pasir; (v) penebangan liar sehingga menjadi gundul; (vi) tanah bekas sawit; (vii) kesehatan penduduk sekitar rumah wallet; (viii) hutan magarove rusak karena abrasi air laut; (ix) kerusakan udara karena pertambangan batubara; (x) kesehatan penduduk sekitar daerah pertambangan.

e. Provinsi Sumatera Selatan

Perhitungan PDRB Hijau untuk Provinsi Sumatera Selatan sudah dilakukan untuk PDRB Kota Prabumulih tahun 2011. Metode perhitungan deplesi yang digunakan meliputi sumberdaya air, migas, dan tanah liat. Sementara itu, metode perhitungan untuk degradasi lingkungan meliputi degradasi lingkungan akibat penggalian tanah liat, serta degradasi lingkungan yang disebabkan oleh angkutan jalan raya. Degradasi lingkungan yang disebabkan penggalian dilihat dari berkurangnya volume kayu bakar yang ada di alam dan biaya pengendalian tanah tererosi. Sedangkan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh angkutan jalan raya dihitung melalui penyakit yang ditimbulkan terutama ISPA dan emisi CO2.

f. Provinsi Kalimantan Timur

Pada tahun 2002, Kementerian Lingkungan Hidup membuat uji coba menyusun PDRB Hijau Kabupaten Kutai Kertanegara. Metode perhitungan yang digunakan hanya memasukkan unsur nilai deplesi dan degradasi lingkungan dari sumberdaya hutan, sektor pertambangan batubara, minyak bumi dan gas alam, serta sumberdaya ikan ke dalam penghitungan PDRB tahun 1999 dan 2000. Selain itu, perhitungan PDRB Hijau di Kabupaten Kutai Kertanegara juga memasukkan nilai degradasi akibat penebangan hutan, kerusakan dan kebakaran hutan.

g. Provinsi Sumatera Barat

Perhitungan PDRB Hijau Kabupaten Padang Pariaman dilakukan untuk tahun 2009-2011. Nilai deplesi sumberdaya alam dilakukan melalui perhitungan (i) deplesi air pada sektor tanaman bahan makanan dan peternakan; dan (ii) deplesi sumberdaya penggalian. Sementara itu, nilai degradasi lingkungan dilakukan melalui perhitungan (i) degradasi sektor transportasi dan industri; (ii) emisi CH4 dari lahan sawah, sektor peternakan; dan (iii) emisi Gas CO2 dari Penggunaan Pupuk Urea.

BAB III METODOLOGI

3.1. Waktu dan Tempat

Kegiatan penyusunan rencana aksi Kajian Penyusunan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan selama selama 2 bulan atau 60 (sembilan puluh) hari kalender. Lingkup kegiatan ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup aktivitas.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data berupa data primer dan sekunder yang bersumber dari satuan kerja yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Survey dilakukan ke beberapa tempat sebagai sampel kajian di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

3.3. Metode Analisis

Dalam kajian ini dilakukan analisis shift share dan sektor unggulan, untuk mengetahui bagaimana kondisi perekonomian di Kabuapten Bandung Barat jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian di Jawa barat. Selanjutnya dilakukan analisis *Locaion Quotien* (LQ) untuk menganalisis lapangan usaha apa saja yang merupakan lapangan usaha unggulan. Untuk metode analisis yang digunakan untuk PDRB Hijau, dilakukan desk studi dan analisis aplikasi panduan PDRB Hijau Kabupaten Bandung Barat. Desk studi akan dilakukan terhadap teoritis dalam penyusunan PDRB Hijau dan sekaligus menelaah tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam penyusunan PDRB Hijau. Analisis aplikasi panduan PDRB Hijau dimaksudkan agar nantinya buku panduan dapat diaplikasikan dengan baik.

Metode analisis yang digunakan dalam tujuan kedua ini adalah dengan menentukan sektor unggulan yang memiliki sumbangan/kontribusi sektor dan komoditas terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat. Sektor yang memberikan sumbangan relatif yang cukup besar terhadap PDRB di suatu kawasan sehingga sektor tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan). Dalam kajian ini untuk mengidentifikasi sektor dan komoditas unggulan digunakan analisis Analisis Shift *share* dan *Location Quotient* (LQ).

Analisis Shift-share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hasil analisis shift share akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Barat dibandingkan Provinsi Jawa Barat. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sebagai hasil perbandingan tersebut. Bila penyimpangan tersebut positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB Kabupaten Bandung Barat memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Teknik analisis *shift share* menurut Arsyad, membagi perubahan pertumbuhan (Dij) menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi di atasnya (Nij), yang diukur dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.

2. Pengaruh pergeseran proporsional atau bauran industri (Mij), yang mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah studi dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Dimana melaui pengukuran ini dimungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah studi terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan.
3. Pengaruh pergeseran diferensial atau keunggulan kompetitif (Cij), yang menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang dijadikan acuan, dimana jika pergeseran diferensial dari suatu sektor adalah positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

Menurut Soepomo dalam jurnal Basuki dan Gayatri (2009), bentuk umum analisis *shift share* dan komponen-komponennya adalah:

Dij = Nij + Mij + Cij Nij = Eij . rn Mij = Eij (rin – rn) Cij = Eij (rij – rin)

Keterangan:

i = Sektor-sektor ekonomi yang diteliti
j = Variabel wilayah yang diteliti (Kabupaten Bandung Barat)
Dij = Perubahan sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Nij = Pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Mij = Bauran industri sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Cij = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
Eij = PDRB sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
rij = laju pertumbuhan sektor i di daerah j (Kabupaten Bandung Barat)
rin = laju pertumbuhan sektor i di daerah n (Provinsi Jawa Barat)
rn = laju pertumbuhan PDRB di daerah n (Provinsi Jawa Barat)

Analisis Tipologi Klassen

Guna untuk menganalisis klasifikasi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat maka digunakan analisis Tipologi Klassen yang merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi daerah pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

Kontribusi PDRB (y) / Laju Pertumbuhan (r)	$y_{ik} > y_i$	$y_{ik} < y_i$
$r_{ik} > r_i$	Kuadran I Sektor maju dan tumbuh cepat	Kuadran III Sektor maju tapi tertekan
$r_{ik} < r_i$	Kuadran II Sektor potensial tapi masih bisa berkembang	Kuadran IV Sektor relative tertekan

Analisis Location Quotien (LQ)

Location Quotient (LQ) merupakan metode analisis yang digunakan untuk menunjukkan lokasi pemusatan atau basis aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang dan jasa dari produksi lokal suatu wilayah. Secara umum metode LQ digunakan untuk mengukur suatu sektor atau komoditi (misalnya sektor x atau komoditi x) menjadi kegiatan/komoditi basis atau non basis pada suatu wilayah tertentu (misalnya i) (Budiharsono, 2001). Nilai LQ diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$LQx = \frac{Si/Ni}{Sj/Nj}$$

Dimana :

LQ_x = Nilai sektor basis/non basis
Si =Jumah PDRB sektor x diwilayah i (Rp).
Sj =Jumlah PDRB total komoditi sektor x diwilayah j, dimana wilayah i merupakan bagian dari wilayah j (Rp).
Ni = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada wilayah i (Rp).
Nj = Pendapatan (PDRB) untuk keseluruhan komoditi ataupun sektor pada wilayah j (Rp).

Berdasarkan formulasi dan asumsi yang berlaku, nilai LQ dapat bervariasi, diantaranya:

$LQ_x >$ =Menunjukkan bahwa komoditi/sektor x merupakan komoditi/sektor basis atas kegiatan ekspor.
$LQ_x = 1$ =Menunjukkan bahwa komoditi/sektor x tidak mengekspor, tetapimampu mencukupi permintaan lokal atau dengan kata lain komoditi/sektor x telah mencapai tingkat swasembada.
$LQ_x < 1$ = Menunjukkan bahwa komoditi/sektor x bukan merupakan komoditi/sektor basis ataupun kegiatan ekspor.

Menurut Kadariah (1985) bahwa metode LQ dengan kesederhanaannya sangat tepat digunakan untuk tahap permulaan dan pemula. Meskipun demikian metode ini memiliki beberapa kekurangan, karena sering terjadi pelanggaran terhadap asumsi yang berlaku, diantaranya:

a. Selera dan pola pengeluaran atau pola konsumsi masyarakat berbeda tiap daerah.
b. Tiap konsumsi rata-rata untuk masing-masing barang tidak sama di setiap wilayah, sehingga wilayah yang konsumsinya tinggi mungkin saja mengimpor, meskipun LQ lebih dari satu (demikian pula sebaliknya).
c. Kebutuhan impor untuk proses produksi dan produktivitas tenaga kerja berbeda di tiap wilayah yang membutuhkan lebih banyak input, mungkin saja mengimpor meski LQ lebih dari satu (demikian pula sebaliknya).

Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat

Penentuan nilai PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, yaitu:

1. Penelusuran Data dan Informasi Awal

a. Pembagian sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat menjadi 17 sektor, yaitu:
   i. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
   ii. Pertambangan dan Penggalian
   iii. Industri Pengolahan
   iv. Pengadaan Listrik dan Gas

v. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang
vi. Konstruksi
vii. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
viii. Transportasi dan Pergudangan
ix. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
x. Informasi dan Komunikasi
xi. Jasa Keuangan dan Asuransi
xii. Real Estate
xiii. Jasa Perusahaan
xiv. Admistrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
xv. Jasa Pendidikan
xvi. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
xvii. Jasa Lainnya

b. Pengumpulan data PDRB Kabupaten Bandung Barat 2020
c. Identifikasi sumberdaya yang mengalami deplesi berdasarkan kegiatan-kegiatan di 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang telah ditentukan, seperti:
   i. Sumberdaya lahan
   ii. Sumberdaya air
d. Identifikasi aspek lingkungan yang mengalami degradasi berdasarkan kegiatan-kegiatan di 17 (tujuh belas) sektor ekonomi yang telah ditentukan, seperti:
   i. Degradasi sumberdaya air
   ii. Degaradasi lahan
   iii. Degradasi akibat limbah dan pencemaran udara dan air

2. Penelusuran dan Pencarian Data Primer dan Sekunder

a. Pengumpulan data terdiri dari:
   - Data Primer dilakukan dengan survey dan penelusuran data pemanfaatan sumberdaya air tanah dari sample masing-masing sektor. Serta pengambilan kerugian akibat kemacetan jalan yang ada di Kabupaten Bandung Barat.
   - Data Sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari dinas, instansi, dan pelaku ekonomi (usaha) terkait, antara lain: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), DLLAJ Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

b. Perhitungan terdiri dari:
   - Estimasi nilai deplesi sumberdaya akibat aktivitas ekonomi dari 17 (tujuh belas) kategori
   - Estimasi nilai degradasi sumberdaya alam dan lingkungan akibat aktivitas ekonomi dari 17 (tujuh belas kategori).
   - Penentuan perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.

bappeltbangda

Tahapan dan metode analisis perhitungan PDRB Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Nilai Tambah
   Dari masing-masing sektor dihitung berapa nilai tambah yang diciptakan dalam satu tahun. Nilai tambah ini disebut juga sebagai sumbangan masing-masing sektor usaha kepada PDRB konvensional daerah yang bersangkutan. Pekerjaan menyusun PDRB konvensional ini biasanya dilaksanakan oleh BPS bersama dengan BAPPEDA.
2. Menghitung Deplesi Sumberdaya Alam
   Dalam perhitungan deplesi sumber daya alam, harus diidentifikasi terlebih dahulu jenis dan volume sumberdaya alam yang digunakan langsung dari alam (*extractive use*) untuk setiap sektor kegiatan ekonomi. Informasi ini dapat diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kantor Badan Statistik Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan instansi teknis terkait, serta wawancara langsung dengan beberapa perusahaan dan industri sampel.
   Penilaian deplesi sumberdaya alam tahun 2020 dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:
   1. Mengidentifikasi seluruh jenis sumberdaya alam yang diekstraksi atau dimanfaatkan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020.
   2. Perhitungan volume masing-masing jenis sumberdaya alam yang diekstraksi atau dimanfaatkan di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020.
   3. Menentukan suku bunga tahun 2020 yang akan dipergunakan dalam perhitungan unit rent.
   4. Menghitung unit rent masing-masing sumberdaya yang terdeplesi.
   5. Unit rent masing-masing sumberdaya alam yang telah diperoleh dikalikan volume sumberdaya alam yang terdeplesi.

   Nilai deplesi diperoleh dengan mengalikan volume pengambilan masing-masing jenis sumberdaya alam dengan **unit rent** atau **unit net price**. Pernyataan ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$D_x = Q_x U_x$$

   di mana:
   Dx = nilai deplesi
   Ux = unit rent
   Qx =volume sumberdaya alam x yang diambil

   Cara menghitung unit rent itu adalah dengan mengurangkan seluruh biaya pengambilan dari nilai jual sumberdaya alam termasuk nilai laba (*balas jasa pengeluaran investasi*) yang layak diterima. Adapun nilai laba yang layak itu dianggap sama dengan tingkat bunga pinjaman di bank sebagai biaya alternatif dari modal yang ditanam untuk mengeksploitasi sumberdaya alam di daerah yang bersangkutan (lihat Kotak berikut).

bappelitbangda

Penerimaan kotor	Rp……
Biaya produksi	
(Bahan, tenaga kerja, sewa, dan sebagainya) Rp……..	
	_____ (-)
Laba kotor	Rp……
Laba layak	Rp……
	_____ (-)
Unit rent	Rp……

3. Perhitungan nilai ekonomi terhadap sumberdaya alam yang di ambil dari alam disebut sebagai nilai deplesi. Valuasi dapat menggunakan nilai pasar untuk produk-produk yang dipasarkan, atau menggunakan nilai dari barang pengganti dan barang pelengkapnya, ataupun dengan *contigent valuation* dengan kesediaan menerima pembayaran. Data harga dapat diperoleh dari perusahaan yang terlibat dalam proses produksi dan penggunaan sumberdaya alam (data primer), atau dari data sekunder.

   Contoh perhitungan: Jika harga emas per kg sebesar Rp.100.000.000, dan biaya produksi sebesar Rp.50.000.000/kg, dan suku bunga bank indonesia sebesar 6,5% maka nilai rente ekonomi dari sumberdaya emas per kg yang diterima PT Emas Kemilau Jaya?

   Laba layak = 6,5% x Rp. 50.000.000/kg
   Laba layak = Rp. 3.250.000/kg
   Rente = Rp100.000.000/kg–(Rp 50.000.000/kg + Rp 3.250.000/kg)
   Rente = Rp 46.750.000/kg

   Jadi Nilai Rente ekonomi per unit adalah sebesar Rp 46.750.000/kg

4. Menghitung PDRB Semi Lingkungan Hidup

   Perhitungan PDRB Semi Lingkungan Hidup dilakukan dengan mengurangi nilai PDRB konvensional dengan nilai deplesi (lihat Kotak).

Nilai produksi	Rp……
Intermediate inputs (bahan-bahan)	Rp…… (-)
Nilai tambah atau **(PDRB) Konvensional**	Rp……
Deplesi SDA	Rp……
Laba layak	Rp……
PDRB Semi Lingkungan Hidup	Rp……(-)
Unit rent	Rp……

5. Menghitung Kerusakan (Degradasi Lingkungan)
   Pada tahap ini, harus dilakukan identifikasi tanah/lahan, air dan udara Kabupaten Bandung Barat yang mengalami degradasi akibat aktivitas ekonomi dari 16 (enam belas) sektor ekonomi.
   a. Menghitung volume kerusakan
      Degradasi sumberdaya tanah/lahan dan air yang terjadi sebagai akibat dari pengambilan sumberdaya alam maupun proses kegiatan usaha di masing-masing sektor dihitung dengan menggunakan beberapa metode pendekatan seperti metode observasi langsung dan metode perkiraan. Misalnya berapa volume tanah yang tererosi, berapa volume tanah yang menjadi sedimentasi, berapa luas hutan yang hilang karena ditebang, berapa kapasitas menyerap karbon yang hilang, dan sebagainya.
   b. Menentukan Nilai Ekonomi dari Kerusakan atau Degradasi Lahan dan Air
      Untuk menentukan nilai ekonomi dari kerusakan atau degradasi lahan dan air dapat digunakan metode biaya pengganti (*replacement costs*) dan/atau metode pendapatan yang hilang (*forgone income*).

Langkah ini merupakan langkah identitas. Langkah berikutnya adalah mengkuantifikasi besaran atau luasan degradasi yang bersangkutan. Akhirnya terhadap degradasi tersebut dapat diperkirakan besarnya nilai degradasi yang bersangkutan. Cara penilaian untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan sumberdaya ekstraktif dapat didekati dengan menggunakan harga pasar dan unit *rent*. Misalnya: luas lahan yang tererosi dinilai harga pupuk. Untuk hal-hal yang merupakan jasa lingkungan dan jasa keanekaragaman hayati penilaiannya didekati dengan menggunakan biaya pengganti (*replacement cost*) atau biaya kerusakan (*damage costs*), atau nilai kesengan (*hedonik*) ataupun dengan biaya perjalanan (*travel cost*). Dapat pula valuasinya dengan cara survey (*contingent valuation*) dengan meneliti tentang kesedian membayar (*willingness to pay*), atau kesediaan untuk menerima ganti rugi (*willingness to accept*).

Adapun cara pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Harga Pasar
   Pendekatan harga pasar merupakan pendekatan yang utama yang harus dicari oleh seorang peneliti. Jika dampak kegiatan ekonomi memiliki harga pasar, maka penggunaan harga pasar dapat dikatakan wajib. Formula perhitungan harga pasar adalah sebagai berikut:

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\,P$$

   Keterangan:
   NED = Nilai Ekonomi Dampak
   K = Kuantitas manfaat dan dampak (orang, luasan wilayah, dll)
   P = Harga pasar

2. Nilai Hilangnya Pendapatan

Perhitungan nilai pendapatan dihitung berdasarkan nilai penerimaan dikurangi dengan nilai pengeluaran. Adapun perhitungan nilai dampak kegiatan ekonomi terhadap hilangnya pendapatan seseorang adalah sebagai berikut:

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\,(\Delta\pi)$$

Dimana

$$\Delta\pi = \pi_t - \pi_0$$

Jadi

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\ (\pi_t - \pi_0)$$

NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas dampak (orang, unit, waktu dll)
Π_0 = Total pendapatan sebelum terjadinya pencemaran
Π_t = Total pendapatan saat terjadinya pencemaran

3. Biaya tambahan (*surcharge cost*)

Dampak kegiatan ekonomi terkadang memberikan dampak terhadap meningkatkannya biaya-biaya untuk tetap memanfaatkan sumberdaya dan lingkungan, walaupun sumber pencemarannya masih terus terjadi. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\,\Delta Tc$$

Dimana

$$\Delta TC = TC_0 - TC_t$$

Keterangan
NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas dampak (orang, unit, dll)
Tc = Biaya tambahan
TC_0 =Total biaya pemanfaatan jasa sebelum terjadinya pencemaran
TC_t = Total biaya pemanfaatan saat terjadinya pencemaran

4. Biaya pencegahan pencemaran (*cost of prevention*)

Biaya pencegahan pencemaran (*cost of prevention*) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan. Biaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti biaya pembuatan turap disepanjang aliran sungai karena tidak adanya pepohonan di area DAS, biaya pembelian alat peredam mesin sehingga tidak menimbulkan kebisingan, biaya pembuatan pengolahan air limbah (*water treatment unit*) agar limbah cair yang terbuang tidak mencemari lingkungan. Biaya-biaya tersebut dapat dijadikan acuan nilai dari dampak kegiatan kegiatan ekonomi terhadap sumberdaya dan lingkungan. Adapun formulanya sebagai berikut:

bappelitbangda

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\ Cp$$

Keterangan:
NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas manfaat dan dampak (orang, unit, dll)
Cp = Biaya pencegahan pencemaran

5. Biaya Penggantian (*replacement cost*)
Biaya pengantian (*replacement cost*) adalah biaya yang dikeluarkan untuk menganti manfaat yang hilang yang dinilai berdasarkan nilai pada barang lainnya yang memiliki manfaat yang sama. Contoh dari biaya penggantian seperti: melakukan pemupukan tanah agar kesuburan tanah kembali seperti semula sebelum adanya aktivitas pertambangan, hilangnya manfaat pemakaian air sungai untuk mandi digantikan dengan pemanfaatan air PDAM.

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\ Cr$$

Keterangan:
NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas dampak (orang, unit, dll)
Cr = Biaya penggantian

6. Biaya penyembuhan penyakit (*cost of illness*)
Biaya penyembuhan penyakit adalah biaya yang dikeluarkan akibat dampak kerusakan sumberdaya dan lingkungan hidup. Adanya kegiatan pertambangan juga akan berdampak terhadap timbulnya beberapa penyakit seperti ISPA, demam bedarah, dan penyakit lainnya yang disebabkan rusaknya sumberdaya dan lingkungan. Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\ Ci$$

Dimana

$$Ci = \sum_{h=1}^{i} T\ C_T$$

Keterangan:
NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas dampak (orang)
Ci = Total biaya penyembuhan penyakit
T = Jumlah hari perawatan
C_T = Biaya perawatan/penyembuhan per hari

bappeltbangda

7. Biaya perjalanan (*Travel Cost Method*)

Biaya perjalanan (*travel cost method*) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh seseorang dari lokasi keberangkatan ke lokasi tujuan hingga kembali pulang (catatan: seseorang tersebut hanya mengunjungi satu lokasi tujuan). Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\,Tc$$

Dimana

$$Tc = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots C_n$$

Keterangan:

NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas dampak (orang/wisatawan)
Tc = Total biaya perjalanan
C_n = Item biaya perjalanan

8. *Contingent Valuation Method (CVM)*

Contingent valuation method merupakan salah satu metode menghitung nilai ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan melalui penilaian preferensi masyarakat.CVM merupakan metode dengan melakukan pertanyaan kepada masyarakat mengenai keinginan membayar (*willingness to pay*) atau keinginan untuk menerima (*willingness to accept*) masyarakat terhadap keberlangsungan manfaat sumberdaya alam dan lingkungan. Langkah-langkah melakukan analisis CVM untuk dampak yang bersifat *intangible* menurut Grigalunas *et al* (1998) adalah:

1. Mengidentifikasi populasi yang terkena dampak
2. Mengembangkan instrumen survey untuk CVM, antara lain:
   a. memperjelas komoditi sumberdaya alam atau jasa lingkungan yang akan dinilai
   b. menyeleksi alat pembayaran yang tepat untuk komoditi atau jasa tersebut (misalnya pajak, fee atau biaya yang lebih tinggi)
   c. memilih metode untuk penentuan nilai (misalnya *open ended, take it or leave it*, dll)
   d. melakukan tes validitas
3. Melakukan survey secara acak kepada populasi yang terkena dampak baik dengan bertemu langsung, melalui telpon atau email
4. Menganalisis data
5. Memperluas kajian dari hasil sampel menjadi seluruh populasi yang terkena dampak.

Adapun formula perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$NED = \sum_{n=1}^{i} K\,\overline{CVM}$$

NED = Nilai Ekonomi Dampak
K = Kuantitas dampak (orang/wisatawan)
$\overline{CVM}$ = Rata-rata nilai CVM.

bappeltitanda

9. Transfer Manfaat (*benefit transfer*)

   Tranfer manfaat (*benefit transfer*) adalah penilaian sumberdaya dan lingkungan hidup melalui penggunaan nilai di lokasi yang memiliki kedekatan karakteristik sumberdaya dan lingkungan hidupnya. *Benefit transfer* merupakan metode yang digunakan setelah metode lainnya

   Namun demikian perlu adanya kaidah dalam penggunaan metode ini yaitu:

   1. Nilai benefit yang akan digunakan memiliki karakteristik yang sama atau hampir sama (seperti: jenis, ekosistem, jumlah, dll).
   2. Mengetahui kapan nilai benefit diperoleh dan melakukan penyetaraan dengan nilai saat dilakukan penelitian (memperhatikan kondisi ekonomi makro).
   3. Sumber nilai benefit yang dipergunakan didapat dari hasil penelitian dengan metodologi ilmiah.

Dalam perhitungan valuasi ekonomi, terkadang kita menggunakan nilai dalam transfer benefit dalam bentuk nilai mata uang dollar Amerika (US $). Oleh karena itu dibutuhkan konversi nilai mata uang tersebut kedalam mata uang rupiah. Adapun nilai kurs dollar merupakan nilai yang diambil pada tahun tersebut, yang merupakan dasar perhitungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun langkah-langkah dalam valuasi ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi jenis ekosistem (habitat)
2. Identifikasi macam fungsi SDAL dalam ekosistem
3. Mengkuantifikasi setiap fungsi SDAL dalam ekosistem
4. Valuasi ekonomi setiap fungsi SDAL

6. Menghitung PDRB Lingkungan Hidup

   Perhitungan nilai PDRB Lingkungan Hidup diperoleh dengan mengurangkan nilai PDRB semi lingkungan hidup dengan nilai kerusakan atau degradasi lingkungan (lihat Kotak Berikut).

PDRB Semi Lingkungan Hidup	Rp.....
Degradasi Lingkungan	Rp..... (-)
PDRB LINGKUNGAN HIDUP	Rp.....

Perhitungan nilai degradasi lingkungan lebih kompleks, karena perlu menggunakan berbagai perkiraan sesuai dengan jenis sumberdaya alam dan lingkungan yang terdegradasi. Sebagai contoh, penebangan hutan akan menyebabkan terjadinya erosi sumberdaya tanah, sehingga lapisan tanah yang subur (*top soil*) akan hilang. Dalam hal ini terdapat ***degradasi sumberdaya lahan***. Selanjutnya kalau tanah yang terbawa erosi itu dibawa melalui sungai akan terjadi pendangkalan sungai maupun menambah kekeruhan air sungai sehingga terjadi ***degradasi sumberdaya air***, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

3.4. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan core dalam kajian ini dan menunjukkan sukses tidaknya kajian. Secara garis besar tahap pelaksanaan kegiatan Kajian Penyusunan PDRB Hijau di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari enam tahapan, yaitu:

1. **Desain Kuesioner**
   Kuesioner didesain oleh Tim Konsultan dan dilakukan diskusi dengan Tim dari Bappeda Kabupaten Bandung Barat. Diskusi mengenai isi kuesioner dengan konsultan dilakukan tanpa mengubah desain pokok kuesioner. Kuesioner akan dipersiapkan oleh tim Konsultan sebagai acuan untuk mengoleksi pertanyaan-pertanyaan yang relevan untuk menjawab tujuan penelitian.

2. ***Training for Interviewer***
   Sebelum turun survey lapangan maka pihak Konsultan akan melakukan dan memberikan kepada surveyor terpilih untuk dilatih teknik-teknik bagaimana data akan dikumpulkan melalui kuesioner. Tim konsultan akan mendesign material dan *guidelines* untuk implementasi survey interviews seperti melakukan training untuk interviewer, methode kompilasi data, dan kuisioner yang digunakan.

3. ***Pre-Testing* Kuesioner**
   Pre-testing kuesioner akan dilakukan oleh pihak Konsultan sebelum survey dilakukan. Pengujian kuesioner ini akan dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan yang terdapat di dalam kuesioner ketika berinteraksi dengan responden. Sehingga masukan pada saat pengujian kuesinoer dapat memperbaiki kualitas kuesioner dan tentu saja untuk memperbaiki keakurasian dan tingkat ketelitian dan isi dari kuesioner.

4. **Survey Lapangan**
   Pelaksanaan survei lapangan akan dilakukan oleh pihak Konsultan, yang merupakan suatu kegiatan pengumpulan data primer. Terkait dengan pengumpulan data primer, para enumerator/surveyor telah membawa guideline berupa kuesioner yang telah diuji sebelumnya. Metode yang akan digunakan dalam survei lapang adalah melalui: (1) *Wawancara face to face*, yaitu metode wawancara langsung dengan pelaku WP Daerah, (2) Observasi Lapangan &*In-Depth Interview*, yaitu Observasi Lapangan bertujuan untuk mencatat keadaan lapangan, dan memotret sampel keadan lingkungan yang terkait dengan Kajian Penyusunan PDRB Hijau di Bandung Barat.

5. ***Entry Data***
   PihakKonsultan akan melakukan entry data primer yang telah diperoleh dalam kegiatan wawancara. Data entri selanjutnya akan dilakukan melakukan *double entry*, validasi dan recoding data. Hasil input data entry juga merupakan bagian dari laporan.

6. **Pengolahan Data**
   Setelah survey lapangan dan entry data dilakukan, tim Konsultan akan melakukan pengolahan data dan sekaligus melakukan analisis dan interpretasi terhadap hasil pengolahan.

Penyusunan implikasi atau rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan nantinya disusun berdasarkan sektor mana saja yang memiliki peranan penting dalam ekonomi dan sektor yang memberikan ancaman terhadap lingkungan. Hasil tersebut nantinya akan disusun rekomendasi kebijakan agar Kabupaten Bandung Barat terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan tetap mempertahankan kelestarian sumberdaya dan lingkungan. Penyusunan rekomendasi kebijakan akan dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) agar nantinya mendapatkan masukan dari lintas sektor.

bappelitbangda

BAB IV
KEADAAN UMUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

4.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bandung Barat terletak diantara 107° 1,10' BT sampai dengan 107° 4,40' BT dan 06° 3,73' LS sampai dengan 07° 1,031'LS, dengan luas sebesar 1.305,77 km^2 atau 130.577 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Subang
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur,
- sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi,
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Desa
		(km^2)	%	
1	Rongga	113,19	8,67	8
2	Gununghalu	160,65	12,30	9
3	Sindangkerta	120,52	9,23	11
4	Cililin	77,82	5,96	11
5	Cihampelas	47,01	3,60	10
6	Cipongkor	79,99	6,13	14
7	Batujajar	31,97	2,45	7
8	Saguling	51,47	3,94	6
9	Cipatat	125,68	9,62	12
10	Padalarang	51,43	3,94	10
11	Ngamprah	36,04	2,76	11
12	Parongpong	45,14	3,46	7
13	Lembang	95,64	7,32	16
14	Cisarua	55,15	4,22	8
15	Cikalong Wetan	112,95	8,65	13
16	Cipeundeuy	101,12	7,74	12
	Kab. Bandung Barat	1.305,77	100	165

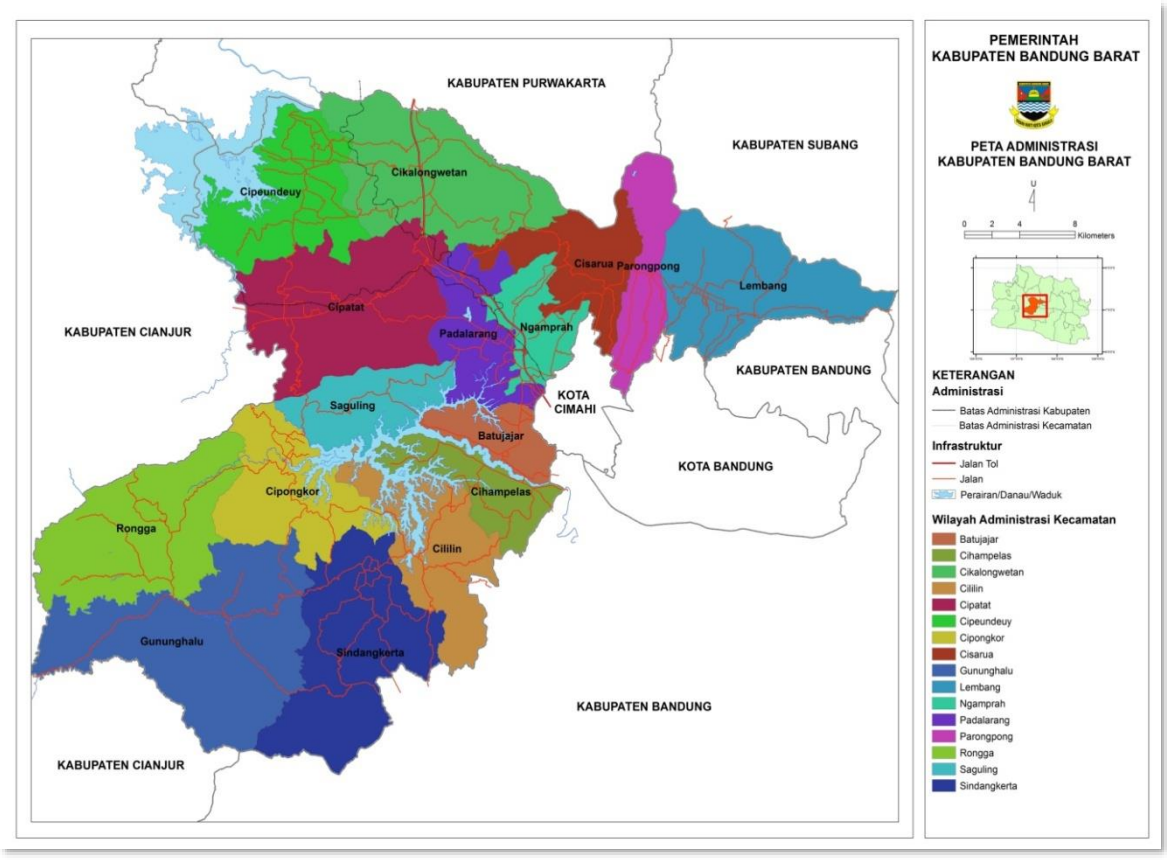
Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2021

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan, yaitu: Kecamatan Padalarang, Cikalongwetan, Cililin, Parongpong, Cipatat, Cisarua, Batujajar, Ngamprah, Gununghalu, Cipongkor, Cipeundeuy, Lembang, Sindangkerta, Cihampelas, Rongga dan Saguling serta terbagi kedalam 165 Desa. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas 160,65 km^2 atau 16.065 Ha (12,30%) dan luas kecamatan terkecil adalah Kecamatan Batujajar dengan luas 31,97 km^2 atau 3.197 Ha (2,45%). Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. Kecamatan terluas di Kabupaten Bandung Barat adalah Kecamatan Gununghalu dan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah Kecamatan Batujajar.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kedudukan Kabupaten Bandung Barat pada lingkup nasional berada pada kawasan andalan yakni, kawasan andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan adalah industri, tanaman pangan, pariwisata, dan perkebunan. Selain itu, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Metropolitan Bandung yang berpusat di Kota Bandung dan merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang dikembangkan di Kota Padalarang, Lembang, dan Cililin.

Kabupaten Bandung Barat dalam lingkup Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah yang termasuk ke dalam PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan pusat Kota Bandung, serta kawasan perkotaan di dalam wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang, yang berbatasan dengan Kota Bandung.

Di dalam rencana pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat termasuk ke dalam wilayah pengembangan Cekungan Bandung dan sekitarnya. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung meliputi Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Wilayah pengembangan Cekungan Bandung merupakan kawasan yang berkembang pesat yang memerlukan pengendalian pemanfaatan ruang terutama di kawasan yang berfungsi sebagai kawasan resapan air.



Gambar 4.1. Peta Administratif Kabupaten Bandung Barat

Kegiatan ekonomi di wilayah pengembangan Cekungan Bandung diarahkan pada kegiatan yang mampu mengendalikan pencemaran air, udara dan sampah. Dalam hal ini kegiatan ekonomi utama difokuskan pada perdagangan dan jasa sebagai kegiatan unggulan untuk kawasan perkotaan.

Selain itu pengembangan Wilayah Cekungan Bandung diarahkan sebagai pusat pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka mendukung pengembangan sektor unggulan pertanian hortikultura, industri, perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan, serta perdagangan dan jasa.

4.2. Kondisi Iklim

Curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bandung Barat < 1500–3500 mm/tahun. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan kurang dari 1500 mm/tahun adalah wilayah dataran yaitu sebagian Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 1500-2000 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 2000-2500 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, Sindangkerta. Wilayah-wilayah yang mempunyai curah hujan 2500-3000 mm/tahun sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gununghalu dan Sindangkerta. Curah hujan tertinggi terjadi di daerah pegunungan di bagian utara Kabupaten Bandung Barat (3000-3500 mm/tahun) terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy.

4.3. Kondisi Topografi

Ketinggian wilayah di Kabupaten Bandung Barat secara umum berkisar antara 110 – 2000 m dpl. Persentase ketinggian terbesar adalah 500 - 1000 m dpl, yaitu seluas 59.614,15 ha atau sebesar 46,68 persen dari luas Kabupaten Bandung Barat, sedangkan ketinggian terkecil yaitu 1500 - 2000 m dpl dengan luas 10.480,39 ha atau sebesar 8,10% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan kemiringan lereng dan beda tinggi serta kenampakan di lapangan morfologi Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan menjadi 4 (empat) satuan morfologi, yaitu morfologi pedataran, landai, perbukitan dan morfologi pegunungan.

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal (>40%). Kecamatan Gununghalu merupakan kecamatan yang mempunyai kemiringan lereng sangat terjal terluas (13.480 Ha). Adapun kemiringan lereng datar (0-8%) merupakan kemiringan lereng dengan luas dominan kedua. Kecamatan Batujajar adalah kecamatan dengan luas lereng datar (0-8%) terluas (4.899 Ha). Kemiringan lereng 8-15% cenderung untuk berada di beberapa kecamatan saja.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat antara lain: aluvial coklat kelabu; aluvial kelabu dan merah; andosol coklat; andosol coklat dan regosol coklat; glei humus dan aluvial; glei humus dan aluvial kelabu; latosol coklat; latosol merah dan coklat; latosol merah kekuningan; latosol tua kemerahan; regosol kelabu dan litosol. Jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Bandung Barat adalah glei humus dan alluvial sekitar 28.938,40 Ha atau 23,84%, sedangkan yang paling kecil adalah jenis tanah alluvial kelabu dan merah sekitar 612,64 Ha atau 0,50 %.

4.4. Pemanfaatan Lahan

Penggunaan lahan menurut fungsinya di wilayah Kabupaten Bandung Barat saat ini dapat dibagi menjadi 2 kawasan, yaitu: kawasan terbangun (perumahan dan perkampungan,

jasa perdagangan, jalan, dan industri) dan kawasan non terbangun (sawah teknis dan sawah non teknis, tegalan atau ladang, kebun, hutan, penggunaan tanah khusus dan lainnya: sungai, jalan).

Wilayah Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bandung, yang mana dalam struktur wilayah pengembangan Jawa Barat berfungsi sebagai *hinterland* dari kabupaten Bandung. Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat sangat sederhana, hal ini ditunjukan dari penggunaan lahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Penggunaan Lahan Kabupaten Bandung Barat (dalam Ha)

No	Jenis Guna Lahan	Total Luas (Ha)	Persentase (%)
A	Kawasan Lindung	48.339,40	36,9
	1. Kawasan Lindung	48.339,40	36,9
B	Kawasan Budidaya	80.808,34	61,73
	1. Kawasan Budidaya Pertanian	68.271,89	52,15
	2. Budidaya Non Pertanian	12.536,45	9,58
C	Lainnya	1.759,29	1,35
	Jumlah Total A,B,C	**130.907,03**	**100,00**

Sumber: Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015-2019

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,9% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan.

4.5. Sumberdaya Air dan Lahan

Sumberdaya air merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat. Keterbatasan air merupakan potensi konflik apabila tidak ada usaha dari semua pihak terkait untuk melestarikan dan mengatur pemakaiannya, baik untuk keperluan industri, perumahan maupun jasa lainnya. Beberapa sumber air di Kabupaten Bandung Barat yang perlu dilestarikan dan dipelihara fungsinya, antara lain: Sungai Citarum dan anak sungainya, Danau atau Situ (Ciburuy, Lembang dan Situ Umar) Waduk atau reservoir (Saguling dan Cirata). Terjadinya alih fungsi lahan untuk pemukiman dan industri jasa lainnya menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan air baik yang berasal dari air tanah maupun air permukaan.

Dalam aspek Hidrogeologi, berdasarkan studi Pusat Sumberdaya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, sumber air bawah tanah di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dibagi ke dalam beberapa zona:

a. Zona kritis untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m3 perbulan. Penyebaran zona kritis pengambilan air tanah di Kabupaten Bandung Barat berada di Kecamatan Batujajar.
b. Zona rawan untuk pengambilan air tanah hanya diperuntukan bagi keperluan air minum dan ramah rangga dengan debit maksimum 100 m^3 per bulan. Zona rawan untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Batujajar. Daerah resapan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Lembang dan Cisarua.
c. Daerah aman pengambilan air tanah, pengambilan baru diperbolehkan dengan debit 170 m^3 per hari dengan sumur terbatas. Daerah aman untuk pengambilan air tanah penyebarannya ada di Kecamatan Cikalong wetan, Padalarang, Ngamprah, dan Parongpong.
d. Daerah resapan, tidak dikembangkan bagi peruntukan kecuali untuk air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimum 100 m^3 per bulan. Daerah resapan ini meliputi Kecamatan Lembang dan Cisarua.

Zona bukan cekungan air tanah, produktivitas aquifer rendah sehingga kurang layak dikembangkan, kecuali aquifer dangkal di daerah lembah untuk keperluan air minum dan rumah tangga dengan pengambilan maksimal 100 m^3 per bulan per sumur. Zona bukan cekungan air tanah penyebarannya di Kecamatan Cipeundeuy, Cipatat, Cipongkor, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu, dan Rongga.

Dalam hal kekayaansumberdaya alam, khususnya bahan galian non logam dan batuan, wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi yang cukup banyak seperti batu andesit, pasir, batu kapur, dan lain sebagainya yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, khusus bahan galian kapur, sebagian besar terdapat di wilayah Kecamatan Padalarang dan Cipatat atau sering pula disebut Kawasan Karst Citatah.

Lebih dari pada itu, luas kawasan hijau yang ada di Kabupaten Bandung Barat merupakan potensi bagi produksi berbagai jenis sumberdaya alam hayati dari sektor pertanian. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan potensial yang ditunjang dengan keragaman berbagai komoditas.

4.6. Demografis

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat pada Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2021, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2020 sebanyak 1.788.336 jiwa dengan komposisi (menurut jenis kelamin) relatif seimbang, yaitu jumlah penduduk laki-laki sebanyak 912.051 jiwa (51 persen) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 876.285 jiwa (49 persen).

Seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung Barat, pertumbuhan migrasi masuk di Kabupaten Bandung Barat cenderung mengalami kenaikan sehingga menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk terutama di beberapa kecamatan perkotaan yang menjadi pusat bisnis (industri, perdagangan dan jasa) dan pusat

pendidikan. Dilihat dari sebaran penduduknya di 16 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, pada tahun 2020 kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Lembang dengan penduduk sebanyak 197.640 orang, diikuti oleh Kecamatan Padalarang yaitu sebanyak 181.359 orang. Sementara itu kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Saguling dengan penduduk sebanyak 33.820 jiwa.

Tabel 4.3. Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Rongga	60.666
2	Gununghalu	79.175
3	Sindangkerta	73.458
4	Cililin	95.470
5	Cihampelas	132.659
6	Cipongkor	99.991
7	Batujajar	107.835
8	Saguling	33.820
9	Cipatat	140.301
10	Padalarang	181.359
11	Ngamprah	177.690
12	Parongpong	113.005
13	Lembang	197.640
14	Cisarua	79.154
15	Cikalongwetan	128.106
16	Cipeundeuy	88.007
Kabupaten Bandung Barat		1.788.336

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dalam Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2021

Piramida penduduk sering dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk ilustrasi grafis yang menggambarkan usia dan distribusi jenis kelamin penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok interval umur pada piramida penduduk, dapat diperoleh gambaran mengenai sejarah perkembangan penduduk masa lalu dan mengenai perkembangan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Sebaliknya, struktur umur penduduk saat ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang.

Untuk melihat jumlah penduduk yang bersekolah tepat waktu dapat dilihat dengan Angka Partisipasi Murni (APM). APM yang mendekati nilai 100 menunjukkan bahwa hampir semua penduduk bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. APM SD di Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 adalah sebesar 95,65 persen untuk penduduk perempuan, artinya 95,65 persen penduduk perempuan usia sekolah SD bersekolah tepat waktu, sesuai dengan usia sekolah dan jenjang pendidikannya. Sedangkan

untuk penduduk laki-laki memiliki nilai lebihrendah, yaitu 95,65. Besarnya persentase APM SD ini masih berhubungan dengan gencarnya program wajib belajar yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 4.4. APM dan APK Menurut Jenis Kelamin,dan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	APM		APK	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1	SD	95,65	97,92	107,53	107,13
2	SLTP	74,65	76,19	91,66	83,73
3	SLTA	48,69	54,93	66,03	79,36

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018

APM perempuan lebih tinggi daripada APM laki-laki pada semua jenjang, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pada jenjang pendidikan ini terdapat perbedaan pandangan antara orang tua di daerah perdesaan dan di perkotaan. Penduduk perdesaan masih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki daripada anak perempuannya.

Selanjutnya, tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Bandung Barat yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan proporsi anak sekolah baik laki-laki maupun perempuan pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK tahun 2017 untuk anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan untuk jenjang pendidikan SD sampai dengan SLTP, sedangkan untuk jenjang pendidikan SLTA, APK perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Secara total APK jenjang pendidikan SD dan SLTP mencapai angka yang tinggi, sedangkan untuk APK jenjang pendidikan SLTA masih rendah.

Tabel 4.5. Capaian IPM Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016-2017

Tahun	Kesehatan	Pendidikan		Daya Beli (PPK[4])	I P M Capaian	Pertumbuhan
	UHH[1]	HLS[2]	RLS[3]			
2016	71,82	11,56	7,63	7.698	65,81	0,89
2017	71,87	11,79	7,74	8.002	66,63	1,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat 2014

[1]) Umur Harapan Hidup *[3]) Rata-rata Lama Sekolah*

[2]) Harapan Lama Sekolah *[4]) Pengeluaran per Kapita*

Angka regional, diolah dari hasil Survei IPM Kabupaten Bandung Barat

Selama dua tahun terakhir, 2016 dan 2017, IPM Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari 65,81menjadi 66,63 pada tahun 2017. Nilai ini lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 dan sebelumnya, karena perhitungan indeks IPM mengalami perubahan. Tabel 4.5 menggambarkan bahwa semua indicator IPM, yaitu UHH, HLS, RLS dan PPK mengalami peningkatan.

4.7. Kondisi Ekonomi

Salah satu indikator kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan.Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi.

Besaran kontribusi perekonomian di Kabupaten Bandung Barat masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

Potensi Unggulan Daerah

Kabupaten Bandung Barat memiliki sumberdaya alam yang cukup banyak dan beragam, mulai dari lahan pertanian, perbukitan/pegunungan dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini apabila diolah dan dimanfaatkan akan menjadi sumber ekonomi yang dapat memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Letak geografis yang strategis bila dilihat dari perspektif sistem perkotaan Metropolitan Bandung Raya seiring dengan pertumbuhan sektor industri dan pengembangan pemukiman yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.
2. Letak geografis kawasan Bandung Barat sebelah utara meliputi Lembang, Parongpong dan Cisarua yang berada di dataran tinggi dimana alam dan lingkungannya sangat mendukung dalam pengembangan peternakan dan pertanian tanaman holtikultura.
3. Keberadaan 2 (dua) waduk besar di Kabupaten Bandung Barat yang memiliki potensi besar dalam pengembangan dan pengelolaan waduk sebagai wisata ramah lingkungan yang didukung agroindustri perikanan melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi yang mampu menggerakan perekonomian masyarakat.
4. Keberadaan obyek wisata yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona wisata utama yaitu Zona Wisata Bandung Utara, Zona Wisata Bandung Selatan dan Zona Wisata Bandung Barat merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada dalam menopang perekonomian masyarakat.
5. Potensi sumberdaya alam yang subur merupakan faktor primer kegiatan usaha tani, dimana struktur perekonomian masyarakat pada umumnya masih bersifat agraris sehingga memungkinkan pengembangan usaha agrobisnis yaitu suatu usaha di bidang pertanian untuk memperoleh keuntungan dengan cara mengelola aspek budidaya, pasca panen proses pengolahan hingga tahap pemasaran.

Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 2 (dua) waduk besar di Jawa Barat yang memiliki potensi besar. Selama ini waduk tersebut dimanfaatkan sebagai tempat usaha budidaya ikan di Kolam Jaring Apung (KJA). Wilayah yang potensial penyumbang terbesar pada usaha KJA ini adalah Kecamatan Cipeundeuy (waduk Cirata) yaitu sekitar 59% produksi total produksi KJA.

Selain itu usaha perikanan lainnya yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat yaitu usaha pembenihan ikan, usaha budidaya ikan pada kolam air tenang, minapadi, dan penangkapan ikan di perairan umum.

Selain potensi daerah di sektor agro baik pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki beberapa potensi di bidang pariwisata baik wisata alam, wisata minat khusus maupun jenis wisata lainnya. Kawasan wisata KBB dibagi dalam 3 zona wisata utama, yaitu Zona Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang mempunyai obyek wisata alam terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada beberapa obyek wisata yang sudah terkelola oleh pemerintah; beberapa dikelola oleh pihak lainnya. Wisata merupakan salah satu kunci pengembangan Kabupaten Bandung Barat jika merujuk pada Visi yang ada. Oleh karena itu, pengembangannya menjadi hal yang sangat penting. Berdasarkan karekteristiknya, objek wisata dapat dikelompokan menjadi objek Wisata Agro, Wisata Alam, dan Wisata Minat Khusus.

Dalam hal potensi sektor lainnya, lokasi-lokasi industri hanya terdapat di beberapa kecamatan yang menjadi lokasi berkumpulnya industri. Kawasan industri dan sentra industri hanya terdapat di Kecamatan Padalarang. Jumlah industri besar dan sedang terbanyak berada di Kecamatan Padalarang. Beberapa jenis industri kecil yang paling banyak terdapat di Kabupaten Bandung Barat adalah anyaman dan makanan. Adapun jenis industri menengah-besar terbanyak adalah industri tekstil sebesar 30,32 persen. Industri menengah-besar yang tergolong agroindustri adalah industri makanan dan minuman, karet dan barang dari karet, kulit dan barang dari kulit, serta jenis lainnya yang dipasok oleh sektor pertanian dengan persentase kurang dari 20 persen.

Dalam hal potensi sumberdaya mineral dan energi, Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi bahan tambang antara lain: emas, galena, batu andesit, pasir, pasir tras, lempung, oker, tanah urug, pasir kuarsa, marmer, kapur, sedangkan potensi energi yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, diantaranya:

1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
   Kabupaten Bandung Barat memenuhi kebutuhan energi nasional dengan tiga pembangkit listrik dari PLTA Saguling, Cirata dan sebagian Jatiluhur. Selain itu, akan dibangun PLTA Cisokan di Kecamatan Rongga dengan kapasitas 1.040 MW yang akan menambah posisi strategis untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah
2) Geothermal
   Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Kecamatan Lembang memiliki potensi cadangan geothermal sebesar 190 MW.
3) Bioethanol
   Pengembangan Bioethanol dari Singkong di beberapa kawasan di Kabupaten Bandung Barat akan segera diintensifkan, yang merupakan sumber energi baru terbarukan.

Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2017ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,09 persen. Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi peningkatan sebesar 1,85 persen, pertumbuhan tahun 2016 adalah 9,14 persen.

PDRB

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Tabel 4.6. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020 (dalam Rp Juta

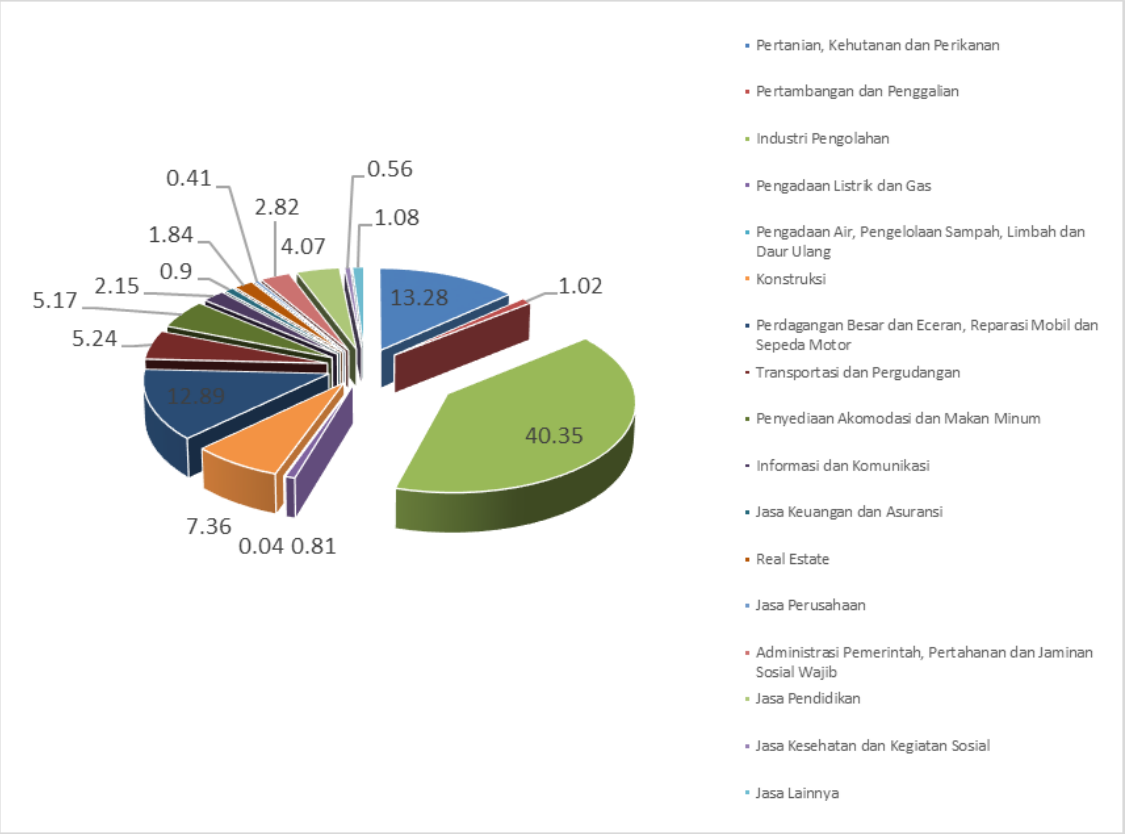
Lapangan Usaha		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.895,30	6.325,51	6.174,47
B	Pertambangan dan Penggalian	473,24	476,90	476,31
C	Industri Pengolahan	17.505,32	18.853,41	18.753,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	354,04	390,49	375,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,78	17,77	19,68
F	Konstruksi	3.305,39	3.613,70	3.421,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.010,72	6.404,98	5.990,22
H	Transportasi dan Pergudangan	2.325,18	2.503,97	2.436,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.217,51	2.436,39	2.401,85
J	Informasi dan Komunikasi	746,82	786,48	999,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	381,60	414,19	418,93
L	Real Estat	773,51	853,13	855,11
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	194,90	212,59	192,79
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.279,81	1.365,49	1.312,15
P	Jasa Pendidikan	1.616,54	1.742,81	1.891,90
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	234,66	259,84	258,02
R,S,T,U	Jasa lainnya	476,30	522,36	501,60
PDRB		43.807,70	47.180,08	46.478,90

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2021

Kontribusi sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan/hotel/restoran terhadap pembentukan PDRB merupakan sektor yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Sektor industri memberikan kontribusi paling tinggi, sedangkan sektor yang paling rendah kontibusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Gambar 4.2 menggambarkan peranan dari masing-masing sektor perekonomian di Kabupaten Bandung Barat. Sektor industri pengolahan memiliki peranan paling tinggi, yaitu mencapai 40,35 persen, selanjutnya adalah pertanian dan perdagangan yang masing-maisng mencapai 13,28 persen dan 12,89 pada tahun 2020.

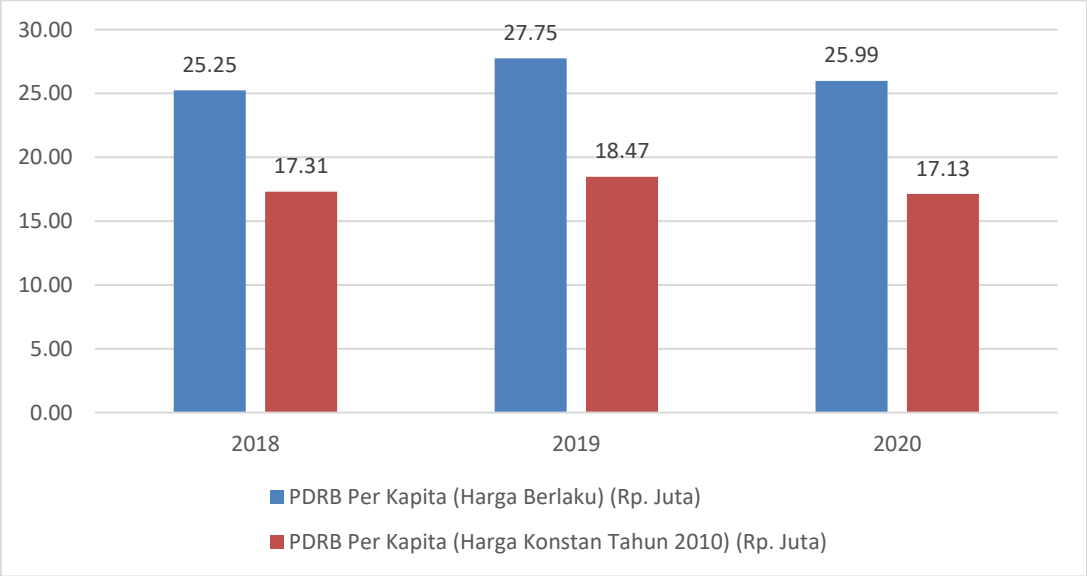
Gambar 4.2. Share Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020



Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2021

PDRB Perkapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.



Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2019-2021

Gambar 4.3. PDRB Per Kapita Per Tahun Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020 (Rp Juta)

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2018-2020 menunjukkan peningkatan. PDRB per kapita/tahun atas dasar harga berlaku Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 sebesar Rp25,25 juta, tahun 2019 sebesar Rp 27,75 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 25,99 juta.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010, yang menggambarkan nilai tambah riil penduduk Kabupaten Bandung Barat di tahun 2018 adalah sebesar Rp 17,31 juta, meningkat menjadi Rp 18,47 juta pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp 17,13 juta. Hal ini menandakan, secara keuangan, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dan terganggu disaat pandemi Covid-19 di tahun 2020.

bappeda bdg

BAB V

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

5.1. Kinerja Perekonomian Perubahan PDRB Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Periode 2018 dan 2020

Perbandingan perekonomian di Kabupaten Bandung Barat antara tahun 2018 dan tahun 2020 mengalami peningkatan, begitu pula dengan perkembangan nilai setiap lapangan usahanya, kecuali untuk sector perdagangan besar dan eceran yang mengalami penurunan. Ini dapat dilihat pada Tabel 5.1. Lapangan usaha yang memiliki peningkatan terbesar pada tahun adalah sector informasi dan komunikasi sebesar 33,82%. Selanjutnya adalah lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta lapangan usaha jasa pendidikan, masing-masing meningkat sebesar 17,28% dan 17,03%.

Tabel 5.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku, Tahun 2018 dan 2020 (dalam Rp Miliar)

Lapangan Usaha		2018	2020	Perubahan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.895,3	6.174,47	4,74%
B	Pertambangan dan Penggalian	473,24	476,31	0,65%
C	Industri Pengolahan	17.505,32	18.753,08	7,13%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	354,04	375,83	6,15%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16,78	19,68	17,28%
F	Konstruksi	3.305,39	3.421,28	3,51%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.010,72	5.990,22	-0,34%
H	Transportasi dan Pergudangan	2.325,18	2.436,30	4,78%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.217,51	2.401,85	8,31%
J	Informasi dan Komunikasi	746,82	999,36	33,82%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	381,6	418,93	9,78%
L	Real Estat	773,51	855,11	10,55%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	194,90	192,79	-1,08%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.279,81	1.312,15	2,53%
P	Jasa Pendidikan	1.616,54	1.891,9	17,03%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	234,66	258,02	9,95%
R,S,T,U	Jasa lainnya	476,3	501,6	5,31%
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		43.807,7	46.478,9	6,10%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, sempat mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,49%. Penurunan ini diakibatkan kejadian luar biasa, yaitu pandemic covid. Pada tahun 2020, sector yang mengalami peningkatan terbesar adalah sector inormasi dan komunikasi sebesar 27,07%. Sedangkan sector yang mengalami penurunan terbesar pada tahun 2020 adalah jasa perusahaan, yaitu menurun sebesar 9,31%.

Tabel 5.2. Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2018 - 2020

Lapangan Usaha		Pertumbuhan per Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,31%	7,30%	-2,39%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,89%	0,77%	-0,12%
C	Industri Pengolahan	10,37%	7,70%	-0,53%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,03%	10,30%	-3,75%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,02%	5,90%	10,75%
F	Konstruksi	-90,03%	9,33%	-5,32%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94%	6,56%	-6,48%
H	Transportasi dan Pergudangan	7,56%	7,69%	-2,70%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,99%	9,87%	-1,42%
J	Informasi dan Komunikasi	4,86%	5,31%	27,07%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,01%	8,54%	1,14%
L	Real Estat	11,87%	10,29%	0,23%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	11,42%	9,08%	-9,31%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,30%	6,69%	-3,91%
P	Jasa Pendidikan	12,61%	7,81%	8,55%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,58%	10,73%	-0,70%
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,69%	9,67%	-3,97%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	8,96%	7,70%	-1,49%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021 (diolah)

Sejalan dengan nilai PDRB nominal, jika dilihat dari PDRB dengan harga konstan tahun 2000, seperti terlihat pada Tabel 5.3, PDRB konstan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2020. Besar kenaikan tersebut berkisar sekitar 2,51%. Begitu pula dengan perkembangan nilai setiap lapangan usahanya. Lapangan usaha yang memiliki peranan terbesar pada tahun 2018 dan 2020 berasal lapangan dari industry pengolahan, dari tahun 2018 ke 2020 mengalami peningkatan sebesar 3,69%. Sedangkan sector yang mengalami peningkatan tertinggi adalah informasi dan komunikasi sebesar 37,69%. Sektor yang mengalami penurunan adalah administrasi pemerintahan, sebesar 7,71%.

Tabel 5.3. Perkembangan PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010, Tahun 2018 dan 2020 (dalam Rp Miliar)

Lapangan Usaha		2018	2020	Perubahan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.688,41	3711,11	0,62%
B	Pertambangan dan Penggalian	334,00	322,49	-3,45%
C	Industri Pengolahan	12.071,60	12517,13	3,69%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	229,85	229,82	-0,01%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,17	12,68	13,49%
F	Konstruksi	2.187,51	2214,82	1,25%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.220,21	4024,97	-4,63%
H	Transportasi dan Pergudangan	1.537,22	1544,01	0,44%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.547,79	1568,89	1,36%
J	Informasi dan Komunikasi	737,77	1015,82	37,69%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	250,86	263,15	4,90%
L	Real Estat	566,48	616,03	8,75%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	143,30	135,5	-5,44%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	765,22	706,2	-7,71%
P	Jasa Pendidikan	1.112,36	1241,42	11,60%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	160,82	172,47	7,24%
R,S,T,U	Jasa lainnya	324,30	343,91	6,05%
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		29.888,89	30.640,41	2,51%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2018 hingga tahun 2020, mengalami fluktuatif, dimana 2018 dan 2019 mengalami peningkatan, sedangkan tahun 2020 mengalami kontraksi sebear 2,41%. Pertumbuhan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh paling tinggi pada tahun 2020, mencapai 27,03%. Sedangkan sector perdagangan besar dan eceran, pada tahun 2020 mengalami penurunan paling tinggi, yaitu sebesar 8,15%.

Tabel 5.4. Pertumbuhan Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat dari Tahun 2018 – 2020 (ADHK)

Lapangan Usaha		Pertumbuhan per Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,66%	2,77%	-2,10%
B	Pertambangan dan Penggalian	2,40%	-1,29%	-2,18%
C	Industri Pengolahan	6,62%	5,79%	-1,98%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,55%	3,17%	-3,08%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,90%	2,94%	10,25%
F	Konstruksi	6,35%	7,38%	-5,71%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,67%	3,84%	-8,15%
H	Transportasi dan Pergudangan	4,97%	4,43%	-3,82%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,70%	6,33%	-4,67%
J	Informasi dan Komunikasi	9,08%	8,39%	27,03%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,88%	3,44%	1,41%
L	Real Estat	9,80%	8,58%	0,15%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	8,29%	7,58%	-12,10%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35%	-3,26%	-4,61%
P	Jasa Pendidikan	5,42%	6,98%	4,33%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,94%	7,55%	-0,28%
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,60%	6,45%	-0,38%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,50%	5,05%	-2,41%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2018 (diolah)

Sementara itu, untuk pertumbuhan perekonomian di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan PDRB harga berlaku, mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2020, sebesar 6,41%. Lapangan usaha yang memiliki peranan terbesar dari tahun 2018 ke tahun 2020 berasal dari sector informasi dan komunikasi, sebesar 45,83%. Selanjutnya adalah jasa pendidikan yang meningkat sebesar 26,93%.

Lapangan usaha yang mengalami penurunan tertinggi adalah untuk lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar -12,98% dan lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar -7,82%.

Tabel 5.5. Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku, Tahun 2018 dan 2020 (dalam Rp Miliar)

Lapangan Usaha		2015	2017	Perubahan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	170.185	192.117	12,89%
B	Pertambangan dan Penggalian	26.617	23.161	-12,98%
C	Industri Pengolahan	827.302	860.071	3,96%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.925	10.070	-7,82%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.790	2.156	20,46%
F	Konstruksi	165.606	171.260	3,41%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	291.738	303.863	4,16%
H	Transportasi dan Pergudangan	111.616	109.148	-2,21%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.641	60.845	11,35%
J	Informasi dan Komunikasi	56.271	82.061	45,83%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	54.705	58.459	6,86%
L	Real Estat	20.756	23.561	13,51%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	8.297	8.403	1,28%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	46.473	46.031	-0,95%
P	Jasa Pendidikan	59.536	75.568	26,93%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.882	16.215	8,96%
R,S,T,U	Jasa lainnya	40.892	45.050	10,17%
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1.962.232	2.088.039	6.41%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021

Tabel 5.6 memperlihatkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2018 hingga 2020, dimana pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 adalah 9,72%, kemidian pada tahun 2019, walaupun terjadi peningkatan PDRB, tetapi pertumbuhannya agak sedikit menurun, menjadi 8,30%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,75%.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 15,84%, selanjutnya adalah lapangan usaha jasa perusahaan dan penyediaan akomodasi dan makanan minuman, masing-masing sebesar 13,05% dan 12,91%.

Tabel 5.6. Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018 - 2020

Lapangan Usaha		Pertumbuhan per Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,28%	9,57%	3,02%
B	Pertambangan dan Penggalian	4,45%	-0,62%	-12,44%
C	Industri Pengolahan	9,52%	6,87%	-2,72%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,64%	0,39%	-8,18%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,71%	8,22%	11,31%
F	Konstruksi	12,23%	9,49%	-5,55%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,16%	10,93%	-6,11%
H	Transportasi dan Pergudangan	7,85%	5,04%	-6,90%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,91%	11,90%	-0,48%
J	Informasi dan Komunikasi	8,54%	8,30%	34,65%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,15%	5,15%	1,63%
L	Real Estat	11,24%	10,61%	2,63%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	13,05%	23,64%	-18,08%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,31%	5,76%	-6,35%
P	Jasa Pendidikan	15,84%	15,27%	10,12%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,45%	12,88%	-3,47%
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,07%	11,54%	-1,23%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	9,72%	8,30%	-1,75%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2018 (diolah)

Pada tahun 2019, hanya ada 1 sektor yang mengalami pertumbuhan begatif, yaitu sector pertambangan dan penggalian. Sedangkan tahun 2020, tidak sedikit yang mengalami kontraksi, seperti pengadaan listrik dan gas, transportasi pergudangan dan administrasi pemerintahan, masing0masing mengalami penurunan sebesar 8,18%, 6,90% dan 6,35%. Sedangkan sector yang mengalami pertumbuhan yang paling tinggi pada masa pandemik adalah sector informasi dan komunikasi dan jasa perusahaan, masing-masing sebesar 34,65% dan 18,08%.

Sejalan dengan nilai PDRB nominal, jika dilihat dari PDRB dengan harga konstan tahun 2000, seperti terlihat pada Tabel 5.7, PDRB konstan mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2020. Besar kenaikan dari tahun 2018 ke 2020 sekitar 2,50%%. Lapangan usaha yang memiliki peranan terbesar pada tahun 2018 berasal lapangan dari Industri Pengolahan sebesar Rp 616.441 milyar. Pada tahun 2020, sector ini mengalami penurunan sebesar 0,35%, menjadi Rp 614.291 miliar.

Tabel 5.7. Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010, Tahun 2018-2020 (dalam Rp Milyar)

Lapangan Usaha		2018	2020	Perubahan (%)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	101.777,20	106.991,94	5,12%
B	Pertambangan dan Penggalian	25.496,23	23.771,26	-6,77%
C	Industri Pengolahan	616.441,68	614.291,24	-0,35%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.438,95	4.964,31	-8,73%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.134,53	1.295,18	14,16%
F	Konstruksi	119.305,16	119.068,58	-0,20%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	216.613,83	214.374,85	-1,03%
H	Transportasi dan Pergudangan	67.701,98	68.097,41	0,58%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38.160,14	38.634,85	1,24%
J	Informasi dan Komunikasi	58.420,75	85.980,07	47,17%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	35.727,39	36.932,39	3,37%
L	Real Estat	17.663,39	19.716,06	11,62%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	6.284,13	5.599,12	-10,90%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27.360,56	26.716,83	-2,35%
P	Jasa Pendidikan	40.075,48	44.978,19	12,23%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.369,96	11.777,49	3,58%
R,S,T,U	Jasa lainnya	30.717,76	32.045,37	4,32%
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		1.419.689,12	1.455.235,14	2,50%

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat, 2021

Sektor yang mengalami lonjakan adalah sector informasi dan komunikasi sebesar 47,17%. Sedangkan sector yang mengalami penurunan tertinggi adalah jasa perusahaan sebesar 10,90%.

Pada tahun 2018, 2019 dan 2020, pertumbuhan pendapatan sempat mengalami peningkatan pada 2018 dan 2019, kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi -2,44%. Pertumbuhan setiap sector dari tahun 2018 dan 2019 tidak banyak mengalami perubahan, tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2020, maka cukup drastic. Banyak sector yang mengalami pertumbuhan negative, dengan nilai penurunan tertinggi adalah pada jasa perusahaan, yaitu sebesar 18,40%. Sedangkan sector yang mengalami peningkatan drastic adalah informasi dan komunikasi sebesar 34,64%.

Tabel 5.8. Pertumbuhan Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2018 – 2020 Berdasarkan atas Harga Konstan 2010

Lapangan Usaha		Pertumbuhan per Tahun		
		2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,11%	2,83%	2,23%
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,11%	-2,76%	-4,11%
C	Industri Pengolahan	6,49%	4,04%	-4,22%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02%	-1,20%	-7,62%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,96%	3,03%	10,80%
F	Konstruksi	7,48%	6,14%	-5,97%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,19%	7,51%	-7,94%
H	Transportasi dan Pergudangan	5,36%	4,97%	-4,18%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,15%	7,25%	-5,60%
J	Informasi dan Komunikasi	9,14%	9,31%	34,64%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,53%	2,22%	1,13%
L	Real Estat	9,64%	9,54%	1,90%
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	8,64%	9,18%	-18,40%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,59%	5,10%	-7,09%
P	Jasa Pendidikan	5,71%	5,19%	6,69%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,90%	9,48%	-5,39%
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,69%	7,14%	-2,63%
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,64%	5,07%	-2,44%

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat, 2018 (diolah)

Rasio PDRB Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020 Berdasarkan Harga Berlaku

Dalam analisis shift share, untuk menganalisis rasio sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat dan Provinsi Jawa Barat, maka analisis dilakukan dan disajikan dalam bentuk Ra, Ri dan ri. Nilai Ra diperoleh dengan menghitung selisih antara jumlah PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2020 dengan jumlah PDRB tahun 2018 dibagi dengan jumlah PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2018. Sedangkan nilai Ri diperoleh dengan menghitung selisih antara PDRB sektor i Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 dengan PDRB sektor i Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018 dibagi dengan PDRB sektor i Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Selanjutnya nilai ri diperoleh dengan menghitung selisih antara PDRB sektor i di Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 dengan PDRB sektor i di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018 dibagi dengan PDRB sektor i di Kabupaten Bandung Barat tahun 2018.

Tabel 5.9. Rasio PDRB Kabupaten Bandung Barat dan PDRB Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2020 (Nilai Ra, Ri dan ri)

Lapangan Usaha		Ra	Ri	ri
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	0,05	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	0,03	-0,07	-0,03
C	Industri Pengolahan	0,03	-0,00	0,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	-0,09	-0,00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,14	0,13
F	Konstruksi	0,03	-0,00	0,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,03	-0,01	-0,05
H	Transportasi dan Pergudangan	0,03	0,01	0,00
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,03	0,01	0,01
J	Informasi dan Komunikasi	0,03	0,47	0,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,03	0,03	0,05
L	Real Estat	0,03	0,12	0,09
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,03	-0,11	-0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,03	-0,02	-0,08
P	Jasa Pendidikan	0,03	0,12	0,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,03	0,04	0,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,03	0,04	0,06

Sumber: BPS Kabupaten Bandung Barat 2021, diolah

Nilai Ra antara tahun 2018-2020, nilai Ra sebesar 0,03, yang mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat meningkat sebesar 3%. Sedangkan untuk nilai Ri untuk seluruh lapangan usaha Provinsi Jawa Barat memiliki nilai yang berbeda-beda, ada yang positif maupun negative. Begitu juga nilai ri di Kabupaten Bandung Barat.

Nilai Ri dan ri di Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke 2020, kecuali beberapa sektor di Provinsi Jawa Barat, seperti sector pertambangan dan penggalian, Industri pengolahan, pengadadaan listrik dan gas, konstruksi, perdagangan besar, jasa perusahaan dam administrasi pemerintahan yang tumbuh negatif, sementara itu beberapa sector yang mengalami pertumbuhan negative di Kabupaten Bandung Barat adalah sector pertambangan dan industry, pengadaan listrik, perdagangan besar, jasa perusahaan dan administrasi pemerintahan. Penurunan ini dapat terjadi dikarenakan adanya pandemic covid di tahun 2020, dimana kegiatan perekonomian banyak yang mengalami penurunan.

Nilai Ri paling besar terdapat pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 0,47. Sedangkan nilai Ri yang paling kecil (negatif terbesar) terdapat pada lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar -0,11. Sedangkan nilai ri untuk Kabupaten Bandung Barat, yang terbesar ada pada lapangan usaha informasi dan kommunikasi juga, sebesar 0,47. Nilai informasi dan komunikasi memiliki nilai terbesar, salah satunya karena adanya pandemic covid, pada masa ini kegiatan lebih ditekankan menggunakan IT, seperti penggunaan aplikasi zoom dan google meet yang digunakan untuk webinar ataupun sekolah.

Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020

Dalam pembangunan suatu daerah, faktor yang memengaruhi pertumbuhan lapangan usahanya adalah komponen pertumbuhan wilayah. komponen pertumbuhan wilayah dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP) dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Jika ketiga komponen pertumbuhan wilayah ini bernilai positif, maka laju pertumbuhan pembangunan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 5.10. Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Regional (PR), Tahun 2018-2020

Lapangan Usaha		Pertumbuhan Regional (PR)	
		n	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	92,35	2,50
B	Pertambangan dan Penggalian	8,36	2,50
C	Industri Pengolahan	302,25	2,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,75	2,50
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	2,50
F	Konstruksi	54,77	2,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	105,67	2,50
H	Transportasi dan Pergudangan	38,49	2,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	38,75	2,50
J	Informasi dan Komunikasi	18,47	2,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,28	2,50
L	Real Estat	14,18	2,50
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	3,59	2,50
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	19,16	2,50
P	Jasa Pendidikan	27,85	2,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,03	2,50
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,12	2,50
	Total	**748,35**	**2,50**

Sumber: diolah

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PR) sebagai pengaruh pertama menjelaskan hasil kali rasio PDRB Provinsi Jawa Barat dengan PDRB Kabupaten Bandung Barat sektor i pada tahun 2018.

Tabel 5.11. Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP), Periode 2018-2020

Lapangan Usaha		Pertumbuhan Proporsional (PP)	
		n	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	96,63	2,62
B	Pertambangan dan Penggalian	-30,96	-9,27
C	Industri Pengolahan	-344,36	-2,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-25,81	-11,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,30	11,66
F	Konstruksi	-59,11	-2,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-149,29	-3,54
H	Transportasi dan Pergudangan	-29,51	-1,92
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-19,50	-1,26
J	Informasi dan Komunikasi	329,56	44,67
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,18	0,87
L	Real Estat	51,65	9,12
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-19,21	-13,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-37,16	-4,86
P	Jasa Pendidikan	108,23	9,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,74	1,08
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,90	1,82
	Total	-117,72	-0,39

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat 2018

Pengaruh pertumbuhan regional menjelaskan perubahan kebijakan ekonomi regional yang memengaruhi perekonomian semua sektor di Kabupaten Bandung Barat, sehingga persentase komponen PR sama dengan persentase laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 2,50 persen. Artinya, jika ditinjau secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2020 telah mempengaruhi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 748,35 miliar (2,50%).

Komponen Pertumbuhan Proporsional (PP) sebagai pengaruh kedua menjelaskan selisih antara Ri dan Ra, hasil itu dikalikan dengan PDRB Kabupaten Bandung Barat sektor i tahun 2018. Komponen ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan sektor dalam permintaan produk akhir, perbedaan dalam ketersediaan bahan mentah, perbedaan dalam kebijakan industri dan perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. *PP* menjelaskan perbedaan kenaikan PDRB Jawa Barat tingkat regional dan kenaikan PDRB sektor ekonomi Jawa Barat secara nasional. Sehingga persentase komponen pertumbuhan proporsional untuk semua sektor di seluruh kabupaten di Jawa Barat sama besar, yang berbeda hanya kontribusi masing-masing sektor ekonomi pada setiap kabupaten (Tabel 5.11).

Sektor yang mengalami penurunan kontribusi paling tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bandung Barat adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan (-13,40%). Sektor yang memiliki nilai PP terbesar (PPij > 0) adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (44,67%), sektor ini sangat

baik dikembangkan di Kabupaten Bandung Barat karena sektor ini mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar Rp -117,72 miliar atau sekitar 39%.

Selanjutnya untuk nilai PPW. Jika nilai PPW positif (PPWij > 0), maka sektor i di Kabupaten Bandung Barat tergolong memiliki dayasaing yang cukup baik, sedangkan jika nilai PPW negatif (PPWij < 0), maka sektor i tersebut digolongkan sebagai sektor yang memiliki dayasaing yang kurang baik. Sektor yang berdayasaing rendah adalah lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (-9,49%). Lapangan usaha ini memiliki dayasaing yang kurang baik jika dibandingkan dengan sektor yang sama di kota lain di Provinsi Jawa Barat. Sektor yang memiliki nilai PPW terbesar adalah lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, yaitu sebesar 8,71%.

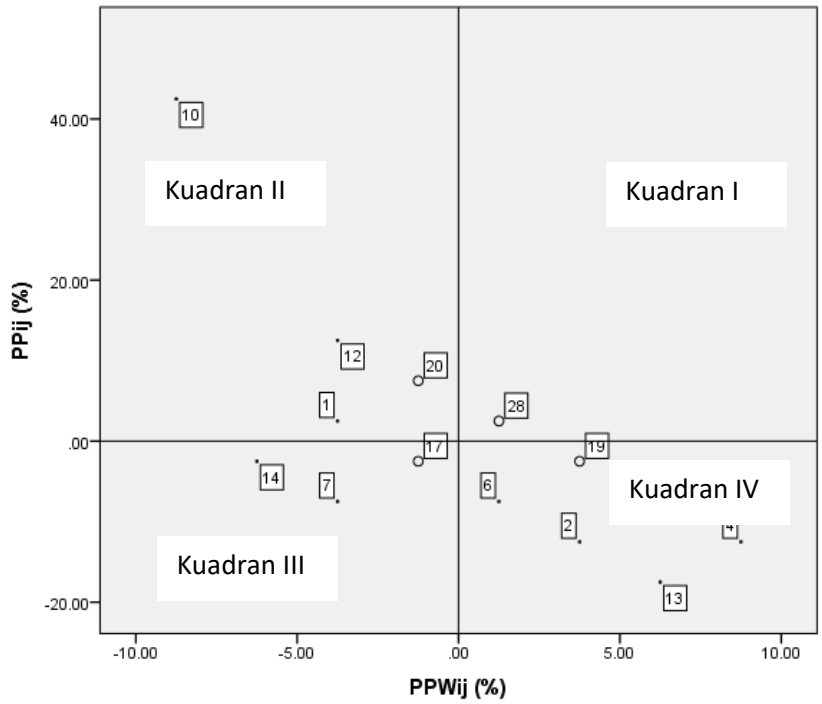
Tabel 5.12. Analisis Shift Share Menurut Sektor Perekonomian di Kabupaten Bandung Barat Berdasarkan Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW), Periode 2018-2020

Lapangan Usaha		Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW)	
		N	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-166,29	-4,51
B	Pertambangan dan Penggalian	11,09	3,32
C	Industri Pengolahan	487,64	4,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	20,03	8,71
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,07	-0,67
F	Konstruksi	31,65	1,45
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-151,62	-3,59
H	Transportasi dan Pergudangan	-2,19	-0,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,84	0,12
J	Informasi dan Komunikasi	-69,98	-9,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,82	1,52
L	Real Estat	-16,29	-2,87
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,82	5,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-41,01	-5,36
P	Jasa Pendidikan	-7,02	-0,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	3,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,60	1,73
	Total	120,89	-0,40

Sumber: diolah

Profil Pertumbuhan PDRB dan Pergeseran Bersih Sektor-Sektor Perekonomian Kabupaten Bandung Barat Periode 2018-2020

Analisis profil pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat bertujuan untuk mengidentifikasikan pertumbuhan PDRB sektor ekonomi di Kabupaten Bandung Barat. Analisis profil pertumbuhan PDRB dengan mengekpresikan nilai persentase pertumbuhan proporsional setiap sektor diplotkan dalam sumbu horizontal sedangkan nilai persentase perubahan pertumbuhan pangsa wilayah kedalam sumbu vertikal.



Sumber: BPS Data Diolah

Gambar 5.1. Profil Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Bandung Barat Periode 2015-2017

Keterangan:

1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10	Informasi dan Komunikasi
2	Pertambangan dan Penggalian	11	Jasa Keuangan dan Asuransi
3	Industri pengolahan	12	Real Estat
4	Pengadaan Listrik dan Gas		
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13	Jasa Perusahaan
6	Konstruksi	14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15	Jasa Pendidikan
8	Transportasi dan Pergudangan	16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17	Jasa Lainnya

Berdasarkan profil pertumbuhan sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat, dari empat kuadran yang berada pada Gambar 5.1. Adapun penjelasan profil pertumbuhan menurut sektor perekonomian di Kabupaten Bandung Barat dari masing-masing kuadran yaitu:

1. Kuadran I merupakan kuadran yang mempunyai nilai PP positif dan PPW positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor pada kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat dan daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun sektor yang menempati posisi kuadran ini pada sektor perekomomian Kabupaten Bandung Barat adalah sektor (11) jasa keuangan dan asuransi, (16) kesehatan dan kegiatan sosial serta (17) jasa lainnya yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan berdaya saing baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2. Kuadran II merupakan kuadran yang mempunyai nilai PP positif dan PPW negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor pada kuadran ini memiliki pertumbuhan yang cepat tetapi

daya saingnya kurang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Barat. Pada sektor perekomomian Kabupaten Bandung Barat, adapun sektor-sektor yang menempati posisi di kuadran ini yaitu sektor (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (10) informasi dan komunikasi, (12) Real Estat dan (15) jasa kependidikan

3. Kuadran III merupakan kuadran yang mempunyai nilai PP negatif dan PPW negatif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor pada kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lambat dan juga memiliki daya saing yang kurang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Barat. Adapun sektor-sektor yang menempati posisi di kuadran ini pada sektor perekonomian Kabupaten Bandung Barat yaitu sektor (7) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan dan (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.
4. Kuadran IV merupakan kuadran yang mempunyai nilai PP negatif dan PPW positif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor pada kuadran ini memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah Provinsi Jawa Barat. Sektor-sektor yang berada pada kuadran ini yaitu sektor (2) petambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) pengadaan listrik dan gas, (6) konstruksi, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan (13) jasa perusahaan.

Tabel 5.13. Pergeseran Bersih Kabupaten Bandung Barat Periode 2018-2020

Lapangan Usaha		Pergeseran Bersih (PB)	
		Nominal	Persentase
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-69,65	-1,89
B	Pertambangan dan Penggalian	-19,87	-5,95
C	Industri Pengolahan	143,28	1,19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,78	-2,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,23	10,99
F	Konstruksi	-27,46	-1,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-300,90	-7,13
H	Transportasi dan Pergudangan	-31,70	-2,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-17,66	-1,14
J	Informasi dan Komunikasi	259,58	35,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,00	2,39
L	Real Estat	35,36	6,24
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	-11,39	-7,95
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-78,17	-10,22
P	Jasa Pendidikan	101,21	9,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,62	4,74
R,S,T,U	Jasa lainnya	11,49	3,54
	Total	3,18	0,01

Sumber: diolah

Nilai pergeseran bersih (*PB*) diperoleh dari penjumlahan nilai *PP* dan *PPW*. Berdasarkan Tabel 5.13, pada kurun waktu 2018-2020, nilai total pergeseran bersih sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat meningkat sebesar 0,01%, ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Bandung Barat memiliki laju pertumbuhan yang progresif.

5.2. Sektor Unggulan Kabupaten Bandung Barat Periode 2015- 2017

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu metode yang dapat menunjukkan lokasi pemusatan/basis aktivitas dan mengetahui kapasitas ekspor perekonomian wilayah serta tingkat kecukupan barang/jasa dari produksi lokal suatu wilayah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Menurut Tarigan (2005) metode ini merupakan suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Penelitian di Kabupaten Bandung Barat ini menggunakan data PDRB Kabupaten Bandung Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan 2010 dan data PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan 2010. Hasil perhitungan analisis LQ menurut pendekatan PDRB untuk seluruh sektor yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada Tabel 5.14.

Tabel 5.14 Nilai LQ Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2020

No	Sektor Perekonomian	Nilai *Location Quotient* (LQ)		
		2018	2019	2020
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.55	1.52	1.44
2.	Pertambangan dan Penggalian	0.79	0.81	0.92
3.	Industri Pengolahan	0.94	0.96	0.97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.45	1.60	1.67
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.41	0.41	0.41
6.	Konstruksi	0.89	0.89	0.89
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.92	0.89	0.88
8.	Transportasi dan Pergudangan	0.93	0.96	1.00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.81	1.79	1.77
10.	Informasi dan Komunikasi	0.59	0.58	0.54
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.31	0.32	0.32
12.	Real Estate	1.66	1.67	1.63
13.	Jasa Perusahaan	1.05	0.93	1.03
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.23	1.25	1.28
15.	Jasa Pendidikan	1.21	1.14	1.12
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.70	0.69	0.71
17.	Jasa lainnya	0.52	0.51	0.50

Sumber : Data Sekunder (diolah) 2021

Tabel 5.14 menunjukkan nilai LQ dari 17 sektor yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Terlihat bahwa dari 17 sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari 1 pada tahun 2018-2020 adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor

penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor real estate; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan sektor jasa pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ke 6 sektor ini termasuk ke dalam sektor basis (unggulan). Sementara itu untuk sector transportasi, sector ini menjadi sector basis pada tahun 2020, sedangkan sector jasa perusahaan, pada tahun 2018 dan 2020 merupakan sector basis, tetapi pada tahun 2019 bukan merupakan sector basis.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor real estate merupakan dua sektor dengan nilai LQ paling tertinggi. Keenam sektor basis ini mampu memenuhi kebutuhan dalam pada wilayahnya dan dapat membantu mendorong sektor non basis untuk menjadi sektor basis. Adapun sektor pertambangan dan penggalian, tidak memiliki nilai LQ dikarenakan sektor tersebut tidak memiliki kontribusi dalam sektor perekonomian di Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

BAB VI
NILAI DEPLESI SUMBERDAYA ALAM

6.1. Deplesi

6.1.1 Deplesi Air Pemanfaatan Kantor Pemerintahan

Air merupakan kebutuhan yang paling hakiki bagi kehidupan manusia, sebagai sumber kehidupan manusia maka perlu adanya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya air. Pemanfaatansumberdaya air oleh kantor pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat diperoleh dari jumlah pegawai yang ada di Kabupaten Bandung Barat dikalikan dengan hari kerja dengan perkiraan selama 233 hari per tahun dan dikalikan dengan 10 liter per pekerja per hari berdasarkan acuan Pedoman Teknis Bidang Air Bersih, Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya,1984. Kemudian harga air sebesar Rp 4.000/m^3 dengan biaya air sebesar Rp 2 683/m^3 dan suku bunga APBN 2020 sebesar 5,40%. Maka hasil perhitungan deplesi sumberdaya air pemanfaatan kantor pemerintahan adalah seperti pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Nilai Deplesi Pemanfaatan Air di Perkantoran Pemerintahan

Jumlah Pegawai (Orang)	Penggunaan Air (M3/Tahun)	Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Keuntungan Layak (Rp)	Nilai Deplesi (Rp)
7992	18621	74485440	49.961.109	2.697.900	21.826.431

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa deplesi sumberdaya air akibat pemanfaatan kantor pemerintahan pada tahun 2020 sebesar Rp.21.826.431. Nilai deplesi sumberdaya air selain ditentukan oleh harga dan biaya air, juga dikarenakan jumlah pegawai dan suku bunga.

6.1.2. Deplesi Air Pemanfaatan Penduduk

Deplesi sumberdaya air oleh pemanfaatan penduduk diperoleh dari SNI terkait kebutuhan air sebesar 150 liter/orang/hari. Dengan harga air sebesar Rp 4.000/m^3, biaya air sebesar Rp 2683/m^3 dan suku bunga sebesar 5,40%.

Tabel 6.2. Deplesi Air Pemanfaatan Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Jumlah Penduduk	Penggunaan air (M3/Tahun)	Penerimaan (Rp Juta)	Biaya Operasional (Rp Juta)	Keuntungan Layak (Rp Juta)	Nilai Deplesi (Rp Juta)
1788336	97911396	391.645	262.696	14.185	114.763

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi sumberdaya air dari pemanfaatan penduduk di tahun 2020 sebesar Rp 114.763.709.657. Berdasarkan hasil perhitungan deplesi sumberdaya air dipengaruhi oleh jumlah penduduk, harga air, biaya air, dan suu bunga.

6.1.3 Deplesi Air Pemanfaatan Sosial

Deplesi air dari pemanfaatan sosial diperoleh dari perhitungan dari pemanfaatan sekolah, rumah ibadah, rumah sakit, dan puskesmas. Adapun acuan penggunaan air setiap unit sosial daoat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3. AcuanPenggunaan Air pada Pemanfaatan Sosial di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 - 2015

Lembaga	Satuan	Penggunaan Air
Sekolah	Lt/Hari/Orang	10
Rumah Sakit	Lt/Hari/Kamar	300
Puskesmas	Lt/Hari/Unit	750
Klinik	Lt/Hari/Unit	3
Masjid ((Jumlah Penduduk/ 1000)*(200/10000))	Lt/Hari/Unit	30
Gereja Protestan	Lt/Hari/Unit	3
Gereja Katholik	Lt/Hari/Unit	3
Pura	Lt/Hari/Unit	3
Vihara	Lt/Hari/Unit	3

Sumber: Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1984; WHO.

Berdasarkan acuan penggunaan air setiap bangunan sosial di atas, maka dapat dihitung nilai deplesi sumberdaya air dengan acuan harga air sebesar Rp 4.000/m^3, biaya air sebesar Rp 2.683/m^3 dan suku bunga sebesar 5,40%. Sedangkan penggunaan air untuk sekolah selama 300 hari.

Tabel 6.4. Deplesi Air Pemanfaatan Sosial di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Lembaga	Unit	Peng-gunaan Air (M3 /Tahun)	Penerimaan (Rp)	Biaya Opera-sional (Rp)	Keun-tungan Layak (Rp)	Nilai Deplesi (Rp)
Sekolah						
-TK (Murid+Guru) (Orang)	24753	74.259	297.036.000	199.236.897	10.758.792	87.040.311
- SD (murid+guru) (Orang)	210236	630.708	2.522.832.000	1.692.189.564	91.378.236	739.264.200
- SMP (murid+guru) (Orang)	69213	207.639	830.556.000	557.095.437	30.083.154	243.377.409
- SMA, MA, SMK (murid+guru) (Orang)	63080	189.240	756.960.000	507.730.920	27.417.470	221.811.610
- Rumah Sakit (tempat tidur) (Unit)	9	986	3.942.000	2.644.097	142.781	1.155.122
- Puskesmas (unit)	79	21.626	86.505.000	58.023.229	3.133.254	25.348.517
- Perusahaan Farmasi (Unit)	62	67.890	271.560.000	182.148.870	9.836.039	79.575.091
- Klinik (Unit)	55	60.225	240.900.000	161.583.675	8.725.518	70.590.807
- Masjid dan Mushalla (Orang)	35	385.340	1.541.360.360	1.033.867.462	55.828.843	451.664.056
- Gereja Protestan (Unit)	12	13.140	52.560.000	35.254.620	1.903.749	15.401.631
- Gereja Katholik (Unit)	2	2.190	8.760.000	5.875.770	317.292	2.566.938
- Pura (Unit)	2	2.190	8.760.000	5.875.770	317.292	2.566.938
- Vihara (Unit)	3	3.285	13.140.000	8.813.655	475.937	3.850.408
					Deplesi	**1.944.213.037**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi air dari pemanfaatan sosial pada tahun 2020 sebesar Rp 62.675.526.222. adapun deplesi air terbesar terjadi di bidang masjid dan mushalla, hal ini dikarenakan jumlah penganut agama Islam yang besar di Kabupaten Bandung Barat.

6.1.4. Deplesi Air dan Rumput Pemanfaatan Sektor Pertanian

Penilaian deplesi sumberdaya air dan rumput sektor pertanian di hitung berdasarkan pemanfaatan air oleh ternak ruminansia dan unggas, pemanfataan rumput oleh ternak ruminansia, pemanfaatan air untuk pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. **Deplesi air pemanfaatan ternak ruminansia**

   Berdasarkan hasil pendataan oleh BPS jumlah ternak ruminansia di Kabupaten Bandung Barat perkembangannya (Tabel 6.5).

Tabel 6.5. Perkembangan Jumlah Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Jumlah Ternak					
Kambing	Domba	Sapi Potong	Sapi Perah	Kerbau	Kuda
35616	460323	6582	39267	1491	3151

Sumber: Kab.Bandung Barat dalam Angka 2021

Dengan demikian maka dapat dihitung kebutuhan air untuk ternak sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda sebesar 40 liter/hari/ternak dan kambing, domba membutuhkan air sebesar 5 liter/hari/ternak. Dengan harga air sebesar Rp 7/liter dan biaya operasional sebesar Rp 3/liter maka didapatkan nilai deplesi sumberdaya air untuk ternak ruminansia tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Deplesi Air Pemanfaatan Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Keuntungan Layak (Rp)	Deplesi (Rp)
1.642.257	11.495.800,93	4.926.772	266.045,68	6.302.983,42

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi tahun 2020 sebesar Rp 6.302.983,42. Peningkatan deplesi air disebabkan meningkatnya jumlah ternak ruminansia yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

2. **Deplesi rumput pemanfaatan ternak ruminansia**

   Berdasarkan jumlah ternak yang sama yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat di tahun 2020. Maka dapat dihitung juga nilai deplesi sumberdaya rumput untuk pakan ternak ruminansia di Kabupaten Bandung Barat. Dengan harga rumput sebesar Rp.350/kg dan dengan biaya operasional pengambilan rumput sebesar Rp.325/kg. Maka hasil perhitungan nilai deplesi rumput pemanfaatan ternak ruminansia adalah sebagai mana terlihat seperti Tabel 6.7.

Dengan demikian didapatkan hasil perhitungan deplesi rumput pemanfaatan ternak ruminansia tahun 2020 sebesar Rp.8.760.047.560. Peningkatan nilai deplesi rumput pemanfaatan ternak ruminansia dikarenakan peningkatan jumlah ternak yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat.

Tabel 6.7. Deplesi Rumput Pemanfaatan Ternak Ruminansia di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Total Rumput (Kg)	Total Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Keuntungan Layak (Rp)	Deplesi (Rp)
1.175.845.310	411.545.858.500	382.149.725.750	20.636.085.191	8.760.047.560

3. **Deplesi air pemanfaatan ternak unggas**

Berdasarkan data unggas yang didapatkan melaui Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat didapatkan data ternak unggas yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat mulai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Perkembangan Jumlah Unggas di Kabupaten Bandung BaratTahun 2020

Jumlah Unggas			
Ayam Kampung	Ayam Ras Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1709993	324175	13324581	367582

Sumber: Kab.Bandung Barat dalam Angka 2021

Dengan demikian maka dapat dihitung kebutuhan air untuk unggas sebesar 0.5 liter/hari/ternak. Dengan harga air sebesar Rp.7/liter dan biaya operasional sebesar Rp.3/liter maka didapatkan nilai deplesi sumberdaya air untuk unggas tahun 2020 sebagaimana terlihat pada Tabel 6.9.

Tabel 6.9. Deplesi Air Pemanfaatan Ternak Unggas di Bandung Barat Tahun 2020

Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Keuntungan Layak (Rp)	Deplesi (Rp)
3444066	24.108.465	10.332.199	557.939	13.218.327

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi air pemanfaatan unggas didapatkan pada tahun 2020 sebesar Rp.13.218.327. Peningkatan nilai deplesi diakibatkan semakin meningkatnya jumlah unggas yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung Barat.

4. Deplesi sumberdaya air pertanian

Kegiatan produksi pertanian tidak terlepas dari kebutuhan sumberdaya air. Adapun berdasarkan SNI 19-6728.1-2002 didapatkan bahwa kebutuhan air untuk luas lahan 1 Ha dibutuhkan air sebanyak 1 liter/Ha/detik, dengan demikian jika setiap 1 siklus tanaman padi membutuhkan waktu hingga panen selama 100 hari, maka kebutuhan air dalam 1 siklus sebesar 8.640 M^3. Adapun perhitungan deplesi sumberdaya air untuk pertanian sebagai berikut:

Tabel 6.10. Deplesi Air Pemanfaatan Lahan Pertanian di Bandung Barat Tahun 2020

Keterangan	Luas Lahan Panen (Ha)
Luas Lahan	30113,93
Panen	3
Kebutuhan Air (M3)	8.640,0
Total Kebutuhan Air (M3)	780.553.065,6
Bunga Bank Indonesia	5,40%
Harga Jual (Ha/Sekali Panen)	15.000,0
Harga Jual (Rp/M3)	1,7
Biaya Produksi (Rp/M3)	0,5
Total Biaya (Rp)	390.276.532,8
Total Harga Jual (Rp)	1.355.126.850,0
Laba Layak (Rp)	21.074.932,8
Deplesi Sumberdaya (Rp)	943.775.384,4

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan bahwa nilai deplesi sumberdaya air untuk lahan produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.943.775.384 di tahun 2020.

6.1.5. Deplesi Air Pemanfaatan Industri dan Perdagangan

Berdasarkan data jumlah industri yang ada di Kabupaten Bandung Barat yang telah dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2020, didapatkan data seperti tampak pada Tabel 6.10.

Tabel 6.10. Data Jumlah Industri di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Industri Mikro dan Kecil	Industri Menengah	Industri Besar
15516	101	156

Dengan asumsi pemanfaatan sumberdaya air rata-rata untuk industri mikro dan industri kecil sebesar 3M^3/hari/unit, untuk industri menengah sebesar 20 m^3/hari/unit, dan untuk industri besar penggunaan sumberdaya air sebesar 38 m^3/hari/unit. Dengan harga air industry sebesar harga Rp 7.000/m^3 dan dengan biaya penyediaan air bersih sebesar Rp 2.683/m^3. Maka dapat dihitung nilai deplesi sumberdaya air pemanfaatan industri dan perdagangan seperti pada Tabel 6.11.

Tabel 6.11. Nilai Deplesi Air Pemanfaatan Industri dan Perdagangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Kebutuhan Air (liter)	Penerimaan (Rp)	Biaya (Rp)	Keuntungan Layak (Rp)	Deplesi (Rp)
16.348.800	122.616.000.000	43.863.830.400	2.368.646.842	76.383.522.758

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi sumberdaya air pemanfaatan industri dan pertambangan tahun 2020 sebesar Rp 76.383.522.758. Nilai deplesi sumberdaya air pemanfaatan industri dan perdagangan dikarenakan pengaruh banyaknya industri dan suku bunga.

Selain itu kerugian di sektor industri dan perdagangan juga terjadi di sub sektor perdagangan khususnya keberadaan kios-kios di pasar yang membutuhkan air. Oleh karena itu

deplesi pemanfaatan air oleh kios pasar harus dihitung. Berdasarkan hasil perhitungan nilai deplesi pemanfaatan air oleh kios pasar dapat dilihat pada Tabel 6.12.

Tabel 6.12. Nilai Deplesi Air Pemanfaatan Kios di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 - 2017

Jumlah Kios Pasar (Unit)	Kebutuhan air (M3/Tahun)	Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Keuntungan Layak (Rp)	Nilai Deplesi (Rp)
6004	6.574.817	39.448.901.501	17.640.233.788	952.572.625	20.856.095.088

Berdasarkan data di PU ciptakarya bahwa perkiraan pemakaian air untuk kios pasar setiap unitnya mencapai 3 m^3/hari. Dengan harga air sebesar Rp 6.000/m^3 dan biaya operasional sebesar Rp 2683/m^3, maka dapat dihitung nilai deplesi pemanfaatan air oleh kios pasar pada tahun 2020 sebesar Rp 20.856.095.089. Peningkatan nilai deplesi pemanfaatan air oleh kios pasar di akibatkan semakin banyaknya kios pasar yang berdiri.

6.1.6. Deplesi Air Pemanfaatan Pariwisata dan Restoran

Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang terkenal keindahan alam dan merupakan salah satu wilayah pariwisata. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dimana didapatkan data jumlah hotel dan restoran seperti pada Tabel 6.13.

Tabel 6.13. Jumlah Unit Kamar, Hotel dan Restoran di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Kegiatan	Unit	Kebutuhan Air (M3/Tahun)	Penerimaan (Rp)	Biaya Operasional (Rp)	Deplesi (Rp)
a. Hotel (Unit Terisi)	1.093	59.864	448.980.414	160.615.260	279.691.929
b. Restoran	151	2.094	15.707.775	5.619.195	9.785.143,78

Sumber: Kab.Bandung Barat dalam Angka 2021

Dengan mengasumsikan rata-rata jumlah kamar per unit hotel sebanyak 250 kamar dan kebutuhan air per kamar dibutuhkan sebanyak 150 liter/hari, dengan harga air sebesar Rp.7.000/M^3 dan biaya operasional sebesar Rp.2683/M^3. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi pada tahun 2020 sebesar Rp. 289.477.073,39, yang terdiri dari Hotel sebesar Rp. 279.691.929,62 dan restoran Rp. 9.785.143,78. Dimana deplesi terdiri dari hotel dengan ocupansi hotel berbintang sebesar 35,17% dan hotel non bintang sebesar 20,05%. Peningkatan pemakaian air hotel dan restoran dikarenakan peningkatan jumlah ocupasi inapan dan jumlah restoran yang terus meningkat.

6.1.7. Deplesi Air Pemanfaatan Kantor Jasa Keuangan

Perhitungan nilai deplesi dari pemanfaatan air oleh kantor jasa keuangan diperoleh dari penggunaan air berdasarkan Direktorat Air Bersih, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1984 yaitu sebesar 10 M^3/hari. Dengan mengasumsikan jumlah kerja sebanyak 300 hari dalam setahun dan

harga air sebesar Rp.6.000/M^3 dan biaya penyediaan air sebesar Rp.2683/M^3 maka didapatkan hasil perhitungan seperti pada Tabel 6.17.

Tabel 6.17. Nilai Deplesi Air Pemanfaatan Kantor Jasa Keuangan di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Lembaga	Nilai Deplesi
a. Bank	895.293.882
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank	1.200.074.778
c. Sewa Bangunan	-
d. Jasa Perusahaan	133.341.642
Total	**2.228.710.302**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa nilai deplesi sumberdaya air pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.228.710.302, nilai deplesi tersebut teridir dari Bank sebesar Rp.895.293.882, Lembaga keuangan tanpa bank Rp.1.200.074.778, dan jasa perusahaan Rp. 133.341.642. Nilai deplesi sumberdaya air disektor ini dipengaruhi oleh jumlah unit kantor jasa keuangan juga mengalami penurunan.

6.1.8. Deplesi Sumberdaya Pertambangan

Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi pertambangan yang cukup besar. Namun demikian saat ini kebijakan pertambangan telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga perhitungan deplesi sumberdaya pertambangan menjadi perhitungan dalam PDRB Lingkungan Hidup tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun demikian dampak pertambangan berupa degradasi lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu dalam perhitungan deplesi sumberdaya pertambangan tidak menjadi perhitungan di PDRB Lingkungan Hidup Bandung Barat.

bappelitbangda

BAB VII
NILAI DEGRADASI LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020

7.1. Nilai Kerugian Pertambangan Kapur

Kabupaten Bandung Barat dalam pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh sektor pertambangan yaitu batu kapur, marmer, dll yang berada di Kecamatan Cipatat di Desa Citatah, Desa Gunungmasegit, Desa Kertamukti, dan Desa Cipatat.

Tabel 7.1. Jumlah Warga di Wilayah Terdampak

Desa	Jumlah Warga
Citatah	18.140
Gunungmasegit	16.519
Kertamukti	8.350
Cipatat	13.566
Jumlah	56.575

Berdasarakan pengamatan dilapangan bahwa aktivitas penambangan memberikan dampak terhadap terjadinya polusi udara yang akan menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), kerugian rumah tangga akibat terganggunya kebersihan rumah akibat debu dari aktivitas pertambangan, dan hilangnya sumber air bersih bagi keluarga sehingga terjadi kesulitan dalam pemenuhan air bersih untuk minum dan memasak. Adapun hasil perhitungan kerugian pertambangan adalah seperti terlihat pada Tabel 7.3.

Tabel 7.2. Penderita ISPA di Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, Kabupateen Bandung Tahun 2020

Rumah Tangga Terdapat Penderita ISPA	Responden	Prosentase	Rata-Rata Biaya (Rp)
Tidak ada	9	30,0	0
1 Orang	13	43,3	396923
2 Orang	8	26,7	334375
Jumlah	30	-	-

Tabel 7.3. Kerugian akibat Penyakit ISPA 2020

Menderita Penyakit ISPA	Nilai Kerugian (Rp)
1 Orang Per Keluarga	243.272.500.000
2 Orang Per Keluarga	126.115.104.167
Jumlah	369.387.604.167

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat penyakit ISPA didapatkan bahwa sebanyak 70 persen rumah tangga di Kecamatan Cipatat anggota keluarga ada yang menderita penyakit ISPA. Sebesar 26,7 persen rumah tangga di Kecamatan Cipatat terdapat 2 anggota keluarga yang menderita ISPA, sebesar 43,3 persen 1 anggota keluarga yang menderita ISPA.

Dengan demikian dapat dihitung nilai kerugian dengan asumsi penyembuhan rata-rata penyakit ISPA untuk penderita 1 orang biaya rata-rata Rp 396.923. Maka nilai kerugian pada tahun 2020 sebesar Rp 243.272.500.000. sedangkan untuk biaya penderita ISPA dalam keluarga terdapat 2 penderita sebesar Rp 334.375 dimana nilai kerugian pada tahun 2020 sebesar Rp 126.115.104.167. Total kerugian akibat menderita ISPA pada tahun 2020 sebesar Rp 369.387.604.167. Walaupun masyarakat mendapatkan kompensasi dari perusahaan pertambangan antara Rp 20.000 per bulan hingga Rp 50.000 per bulan, namun kompensasi tersebut cukup kecil dibandingkan nilai kerugian yang ditanggung oleh rumah tangga. sedangkan perhitungan kerugian akibat kotornya rumah akibat debu dari aktivitas pertambangan seperti terlihat pada Tabel 7.4

Tabel 7.4. Nilai Kerugian Kebersihan Rumah Tanggadi Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Desa	Jumlah Warga	Rata-Rata Nilai Kerugian	Jumlah
Citatah	18.140	29.444	133.530.556
Gunungmasegit	16.519	15.556	64.240.556
Kertamukti	8.350	21.429	44.732.143
Cipatat	13.566	22.000	74.613.000
Total			317.116.254

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian rumah yang kotor akibat aktivitas pertambangan didapatkan bahwa rata-rata kerugian rumah tangga berkisar Rp 15.556 sampai Rp 29.444 per bulan sebagai biaya tambahan bahan-bahan pembersih rumah. Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan kerugian rumah tangga dari kotornya rumah pada tahun 2020 sebesar Rp 317.116.254. Selain kerugian karena penyakit ISPA dan kotornya rumah, aktivitas pertambangan di Kecamatan Cipatat juga mengakibatkan buruknya air bersih yang ada, sehingga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk minum dan memasak bahkan untuk mandi harus membeli. Adapun perhitungan akibat keruian air bersih dikarenakan kualitas air memburuk (berbusa dan bau) adalah sebagai mana Tabel 7.5.

Tabel 7.5. Kerugian Air Bersih Rumah Tangga (RT)di Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Desa	Jumlah Warga	Rata-rata Biaya Pembelian air (Rp)	Jumlah (Rp)
Citatah	18.140	291.111	15.842.266.667
Gunungmasegit	16.519	250.000	12.389.250.000
Kertamukti	8.350	264.286	6.620.357.143
Cipatat	13.566	270.000	10.988.460.000

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa kerugian akibat pemenuhan kebutuhan air bersih per rumah tangga dalam setahun rata-rata mengeluarkan biaya berkisar Rp.250.000 sampai Rp.291.111/bulan. adapun kerugian pada tahun 2020 sebesar Rp. 45.840.333.810. Jumlah kerugian akibat buruknya air bersih ini akan terus bertambah seiring dengan semakin sulitnya sumur-sumur rumahtangga menghasilkan air dan buruknya air yang ada seperti yang dirasakan saait ini yaitu berbusa dan berbau.

7.2. Nilai Kerugian Akibat Bau Sampah di Cipatat

Kabupaten Bandung Barat memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Sarimukti di Kecamatan Cipatat. TPA tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dari Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kota Bandung. Saat ini penampungan TPA Sarimukti telah mendekati penuh. Keberadaan sampah berdampak terhadap buruknya udara terutama wilayah yang dilewati truks-truks sampah. berdasarkan sampel yang dilakukan di 3 desa yaitu Desa Sarimukti, Desa Rajamandala, dan Desa Kertamukti didapatkan rata-rata kerugian per tahun sebesar Rp.106.667/tahun/RT. Dengan demikian dapat dihitung kerugian ekonomi akibat buruknya udara di Kecamatan Cipatat dapat dilihat pada Tabel 7.7.

Tabel 7.7. Nilai Kerugian Akibat Bau Sampah di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020

Jumlah RT di Desa Citatah dan Desa Sarimukti	Nilai Total Kerugian
6.035	7.724.800.000

Berdasarkan banyaknya jumlah rumahtangga yang ada di Desa Citatah dan Desa Sarimukti didapatkan kerugian pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 7.724.800.000. Peningkatan dan penurunan kerugian ini dikarenakan jumlah rumah tangga yang mengalami kerugian meningkat atau menurun.

bappelitbangda

BAB VIII
NILAI PDRB LINGKUNGAN HIDUP

8.1. Total Nilai Deplesi Sumberdaya dan Degradasi Lingkungan

Berdasarkan hasil perhitungan di atas mulai dari nilai deplesi sumberdaya alam dan nilai degradasi lingkungan, didapatkan bahwa total nilai deplesi pada tahun 2020 sebesar Rp 226,21 milyar dan nilai degradasi pada tahun yang sama sebesar Rp 423,27 milyar. Dengan demikian didapatkan nilai PDRB Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1. Perhitungan PDRB Lingkungan Hidup Tahun 2020 (Rp. Milyar)

Kategori	Uraian	Nilai PDRB Coklat	Nilai Deplesi	Nilai PDRB Semi Hijau	Nilai Degradasi	Nilai PDRB Hijau
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.174,47	9,72	6.164,75	-	6.164,75
B	Pertambangan dan Penggalian	476,31	-	476,31	415,55	60,76
C	Industri Pengolahan	18.753,08	97,24	18.655,84	-	18.655,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	375,83	-	375,83	-	375,83
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,68	-	19,68	7,72	11,96
F	Konstruksi	3.421,28	-	3.421,28	-	3.421,28
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.990,22	-	5.990,22	-	5.990,22
H	Transportasi dan Pergudangan	2.436,30	-	2.436,30	-	2.436,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.401,85	0,29	2.401,56	-	2.401,56
J	Informasi dan Komunikasi	999,36	-	999,36	-	999,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	418,93	2,23	416,70	-	416,70
L	Real Estate	855,11	-	855,11	-	855,11
M,N	Jasa Perusahaan	192,79	-	192,79	-	192,79
O	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.312,15	114,79	1.197,36	-	1.197,36
P	Jasa Pendidikan	1.891,90	1,29	1.890,61	-	1.890,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	258,02	0,65	257,37	-	257,37
R,S,T,U	Jasa Lainnya	501,60	-	501,60	-	501,60
	TOTAL	46.478,90	226,21	46.252,69	423,27	45.829,40

bappeltbangda

BAB IX
IMPLIKASI KEBIJAKAN

1. Berdasarkan hasil analisis lapangan usaha unggulan, akomodasi dan wisata masih bukan merupakan sektor unggulan. Hal ini dikarenakan lapangan usaha ini masih kalah dengan Kota Bandung. Sebaiknya dapat mengadopsi model pembagian pendapatan daerah seperti di Provinsi Bali, dimana daerah yang maju, seperti Pemerintah Kota Denpasar, Badung dan Provinsi Bali memberikan subsidi kepada daerah sekitarnya untuk pengembangan daerah. Hal ini mengingat wisata lebih banyak tinggal di Denpasar dan Badung, sedangkan wilayah lainnya banyak memberikan pemandangan yang indah dan unik, tetapi tidak banyak wisatawan yang tinggal di daerah di luar Denpasar dan Badung.

   Oleh karena itu jika ini dapat direalisasikan, maka Kabupaten Bandung Barat tidak perlu bersaing dengan Kota Bandung, tetapi dapat membagi peran, seperti Kabupaten Bandung Barat lebih difokuskan pada wisata alam agar menjadi lebih menarik lagi. Dengan focus pada pengembangan wisata, maka pengelolaan lingkungan dapat lebih optimal. Dalam pengembangan wisata, maka berbagai program wisata dapat lebih didiversifikasi dan menjadi lebih menarik.

2. Deplesi sumberdaya yang terbesar lainnya adalah penggunaan sumberdaya air, baik dari kegiatan masyarakat, industri dan lainnya. Dampak yang terjadi bagi masyarakat pun cukup signifikan, seperti masyarakat sulit mendapatkan air bersih. Oleh karena itu diperlukan penghematan sumberdaya air, seperti *Rain Water Harvesting* (Pemanfaaatan), *Flow Restrictor* (Penghematan) dan sosialisasi pemanfaatan air.

   a. Pemanfaatan Air Hujan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2009, air hujan merupakan sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai imbuhan air tanah dan/atau dimanfaatkan secara langsung untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan air hujan adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, menggunakan, dan/ atau meresapkan air hujan ke dalam tanah. Saat ini, teknik pengelolaan air hujan melalui model limpasan air hujan (*run off*) langsung disalurkan pada drainase dengan jenis drainase konvensional. Drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan kelebihan air secepat-cepatnya ke sungai terdekat seterusnya mengalir ke laut. Dampak dari pemakaian konsep ini dapat mengakibatkan kekeringan, banjir, longsor dan pelumpuran terjadi di mana-mana. Salah satu cara untuk mengendalikan limpasan air hujan sehingga dapat digunakan sebagai sumber air, terinfiltrasi serta evaporasi (selayaknya siklus alami air) agar genangan atau banjir serta kekeringan dapat terminimalisirkan yaitu dengan pendekatan pembangunan berdasarkan konsep *Low Impact Development* (LID). Konsep ini menerapkan pengolahan limpasan air hujan yang memperhatikan aspek konservasi. Konsep LID yang diterapkan untuk mengolah air hujan yang menjadi air limpasan sehingga dapat digunakan sebagai

sumber air dengan praktek pemanenan air hujan atau *Rainwater Harvesting*. Prinsip-prinsip LID yaitu: memanfaatkan penampungan pada gedung atau kolam/ danau buatan dan lainnya, infrastruktur drainase, dan penataan lahannya dalam usaha menahan aliran air hujan ke daerah hilir, mengurangi perubahan lahan menjadi lahan kedap air; memperbanyak tumbuh-tumbuhan penutup tanah seperti lahan yang tertutup rumput dan tanam-tanaman; memperlama waktu konsentrasi dengan memperpanjang jalur aliran; melakukan konservasi dari sistem drainase alam sehingga dapat menurunkan puncak banjir; tampungan air yang permanen atau sementara sangat diperlukan untuk mengontrol volume dan puncak banjir, serta kualitas air limpasan. Contoh model pemanenan air hujan ini adalah dengan menggunakan *cistern*, yaitu tempat dibawah tanah untuk menampung air hujan. Penggunaan system ii dilakukan di Bank Indonesia. Cistern ini merupakan salah satu cara memanajemen air terutama di daerah kering dengan jumlah air sedikit. Penggunaan air dari cistern ini digunakan untuk menyiram tanaman di sekitar kantor Bank Indonesia. Dengan memanfaatkan air system ini, maka Bank Indonesia dapat melakukan penghematan penggunaan air untuk taman hingga mencapai 64%.

b. Penggunaan alat penghemat air atau *flow restrictor*, ini dapat melakukan penghematan penggunaan air. Misalnya saja untuk penghematan air di tempat ibadah, masjid. Penggunaan *flow restrictor*mampu menghemat volume air wudhu (bersuci) dari rata-rata pemakaian 2,8liter menjadi 0,9 liter/orang. Upaya itu mampu menghemat penggunaan air bersih hingga 67%. Penggunaan *flow restrictor*ini dapat dilakukan dengan memasangnya pada keran air.

c. Kebutuhan air industri pun cukup tinggi, ini yang mengakibatkan nilai deplesi air di lapangan usaha industri meningkat. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Bandung Barat dapat membuat suatu pengolahan air dari air yang sudah digunakan, untuk digunakan kembali di lapangan usaha industri.

d. Sosialialisasi penghematan penggunaan air perlu dilakukan mengingat penggunaan air oleh penduduk sangat tinggi.

3. Pertambangan Kapur di Cipatat. Degradasi yang terjadi di kawasan tambang kapur/karst, perlindungan terhadap kawasan kapur harus digalakkan. Sebenarnya peraturan untuk melindungi kawasan karst sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun upaya untuk menegakkan peraturan tersebut masih sangat minim. Selain itu, kawasan ini kerap terjadi benturan kepentingan. Penduduk pada wilayah tersebut mengalami suatu dilema, pada satu sisi mereka harus ikut aktif dalam upaya melindungi kawasan kapur, namun di sisi lain alasan perekonomian menyebabkan mereka "terpaksa" melakukan kegiatan penambangan batu kapur di wilayah tersebut. Jalan tengah harus dicari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penambangan harus diimbangi dengan upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Penambangan tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja tidak mudah, dibutuhkan ketegasan dari pemerintah serta kesadaran diri dari penambang batu kapur untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan.

bappeslitbangda

Penambangan kapur yang tidak terkendali mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut berawal dari penebangan-penebangan vegetasi penutup untuk mendukung aktivitas penambangan batu kapur. Akibat dari penebangan-penebangan vegetasi tersebut, bukit-bukit kapur menjadi gundul, tetapi secara umum tidak adanya usaha untuk mereklamasi bukit tersebut setelah aktivitas penambangan selesai.

Penggundulan yang terjadi mengakibatkan tidak mampunya wilayah tersebut untuk menangkap air hujan. Dampaknya, wilayah tersebut akan semakin kering. Berkurangnya vegetasi menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen di udara sehingga suhu di wilayah tersebut menjadi semakin tinggi dan tanah menjadi semakin labil, rentan terhadap longsor.

Banyak penyakit yang muncul di sekitar area penambangan batu kapur. Misalnya gangguan pada saluran pernapasan yang diakibatkan oleh asap-asap dari pabrik maupun aktivitas penambangan. Asap tersebut dapat menimbulkan penyakit-penyakit seperti sesak napas, bronchitis, asma, ISPA, dan bahkan radang paru-paru. Selain penyakit/gangguan pada sistem pernapasan, penyakit kencing batu yang disebabkan oleh air yang dikonsumsi oleh masyarakat mengandung zat kapur dengan kadar yang tinggi. Untuk menghindari penyakit kencing batu tersebut, penduduk terpaksa mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih. Namun, di beberapa tempat telah dibangun tandon besar penampung air hujan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk aktivitas sehari-hari.

Oleh sebab itu, perlindungan terhadap kawasan kapur harus digalakkan. Sebenarnya peraturan untuk melindungi kawasan karst sudah ditetapkan oleh pemerintah, namun upaya untuk menegakkan peraturan tersebut masih sangat minim. Selain itu, di kawasan ini kerap terjadi benturan kepentingan. Penduduk pada wilayah tersebut mengalami suatu dilema, pada satu sisi mereka harus ikut aktif dalam upaya melindungi kawasan kapur, namun di sisi lain alasan perekonomian menyebabkan mereka "terpaksa" melakukan kegiatan penambangan batu kapur di wilayah tersebut. Jalan tengah harus dicari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penambangan harus diimbangi dengan upaya reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas pertambangan. Selain itu, penambangan juga tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus tetap berada di dalam koridor hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja tidak mudah, dibutuhkan ketegasan dari pemerintah serta kesadaran diri dari penambang batu kapur untuk ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan.

4. Pengolahan sampah di Cipatat merupakan hal yang sensitive, dimana TPA ini merupakan lokasi pembuangan sampah dari beberapa kota dan kabupten di sekitar Kabupaten Bandung Barat. Dampak dari sampah bukan saja dari pencemaran terhadap air dan tanah, tetapi juga dampaknya terhadap polusi udara. Beberapa kebijakan mengenai sampah adalah dengan beberapa cara, seperti:

   a. Pemanfaatan Gas Metan

      Sampah organik juga dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, melalui biomassa. Apabila biomassa tersebut dimanfaatkan untuk menghasilkan energi, maka

energi tersebut disebut dengan bioenergi. Salah satu bentuk bioenergi adalah biogas. Teknologi biogas memberikan peluang bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan energi sehari-hari secara mandiri.

b. Energi dari Sampah Plastik

Proses ini dapat dilakukan karena pada dasarnya plastik adalah polimer atau rantai panjang atom yang saling mengikat satu sama lain. Karena pada dasarnya plastik berasal dari minyak bumi, maka proses ini dapat dikatakan hanya mengembalikannya ke dalam bentuk asal mulanya. Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, termasuk yang berkaitan dengan teknologi pengolahan sampah, maka pengembangan teknologi konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak yang setara dengan bensin dan solar belakangan ini pun marak dilakukan.

c. Penggunaan *Incenerator*

Penggunaan *incinerator* untuk pembakaran sampah domestik, sampah medical, sampah industrial, dan lainnya. Incinerator untuk penggunaan domestik waste biasanya digunakan untuk pembakaran sampah dimana sampahnya adalah sampah biasa atau sampah organik dan sampah plastik. Untuk membangun *incinerator* memerlukan lahan yang memadai untuk menampung bahan sampah juga menampung sisa hasil pembakaran. Sementara *incinerator* memerlukan bangunan tertutup atap pelindung supaya mesin dan bahan yang akan dibakar tidak terkena hujan atau basah.

d. Waste to Energy

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dengan teknologi *Waste to Energy* (WTE) kepada warga yang bertempat tinggal di sekitar TPA menjadi keharusan. WTE atau yang di Indonesia dikenal dengan istilah PLTSa, didefinisikan sebagai alat modern yang dilengkapi peralatan kendali pembakaran serta sistem monitor emisi gas buang yang kontinyu dan dapat menghasilkan energi listrik.

Beberapa kegiatan ini semua dapat dilakukan, apakah dilakukan sendiri oleh Pemkab Bandung Barat ataukah bekerja sama dengan pihak swasta dalam penyelesaian masalah ini. Sebaiknya, Pemkab Bandung Barat dapat juga melakukan *Payment Environmental Services* (PES/Jasa Lingkungan). Hal ini perlu dilakukan agar kelestarian daerah sekitar TPA dapat berlangsung dengan bantuan berbagai stakeholders yang ada. Sehingga tidak terjadi penutupan kawasan TPA oleh mkasyarakat sekitar.

BAB X
KESIMPULAN

1. Nilai total pergeseran bersih sektor ekonomi Kabupaten Bandung Barat sebesar 4,09%, ini berarti bahwa perekonomian Kabupaten Bandung Barat memiliki laju pertumbuhan yang cepat atau *progresif*. Seluruh sector memiliki pergeseran bersih yang positif, kecuali untuk lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang memiliki nilai pergeseran bersih yang negatif.

   Berdasarkan analisis LQ terhadap perekonomian Kabupaten Bandung Barat, hamper semua lapangan usaha di Kabupaten Bandung Barat adalah sektor unggulan, kecuali untuk lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Real Estat, lapangan usaha Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Pendidikan. Hal ini dikarenakan kegiatan di sekitar Kabupaten Bandung Barat masih terserap di Kota Bandung, terutama dalam bidang perumahan, wisata dan Pendidikan.

2. Nilai deplesi sumberdaya di kabupaten Bandung Barat di tahun 2020 sebesar Rp.226,21 Milyar, yang terdiri dari deplesi sumberdaya air dan rumput.

3. Nilai degradasi di Kabupaten Bandung Barat dari tahun 2020 sebesar Rp.423,27 Milyar yang disebabkan adanya kegiatan pertambangan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Cipatat.

4. PDRB Lingkungan hidup di tahun 2020 sebesar Rp.45.829,40 milyar. Dimana nilai PDRB Konvensional menjadi PDRB Semi Lingkungan Hidup turun sebesar 0,49% dan nilai PDRB Konvensional menjadi PDRB Lingkungan Hidup turun sebesar 1,40%.

bappeltbangda

DAFTAR PUSTAKA

BPS Provinsi Jawa Barat. 2016. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. Bandung

BPS Provinsi Jawa Barat. 2017. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. Bandung

BPS Provinsi Jawa Barat. 2018. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. Bandung

BPS Kabupaten Bandung Barat.2016. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka. Bandung

BPS Kabupaten Bandung Barat.2017. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka. Bandung

BPS Kabupaten Bandung Barat.2018. Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka. Bandung

Budiharsono, S. 2001. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. P.T. Pradaya Paramita, Jakarta.

United Nation. 2014. System of EnvironmentalEconomic Accounting 2012— Central Framework. United Nation. New York

bappelitbangda



GRASICA

PT. Anugrah Solusi Carvidae

bappelitbangda